

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODAMAS) DI KOTA KEDIRI

(Studi Pada RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02
Kelurahan Mojojoto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

MUHAMMAD ZACKY ABDALLA

NIM. 125030118113001



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMNISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO

***"Janganlah membanggakan dan menyombongkan diri dari apa-apa yang telah kita peroleh, turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang menciptakan kita
Allah SWT (Hadist)"***

"Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success"

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat
(PRODAMAS) di Kota Kediri
Disusun Oleh : Muhammad Zacky Abdalla
NIM : 125030118113001
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : -

Malang, 5 April 2016

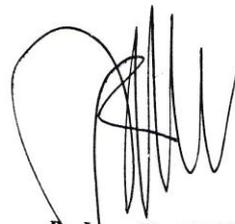
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Sarwono, M.Si
19570909 198403 1 002



Dr. Imam Hanafi, MSi, MS
19691002 199802 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 April 2016

Jam : 09.00 WIB

Skripsi atas nama: Muhammad Zacky Abdalla

Judul : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di
Kota Kediri

Dan dinyatakan lulus

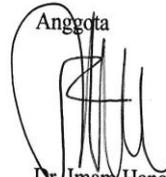
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si, M.S
NIP. 19601103 198702 1 001

Ketua



Dr. Suryadi, M.Si
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, M.S
NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, April 2016



Muhammad Zacky Abdalla
NIM. 125030118113001

RINGKASAN

Muhammad Zacky Abdalla, 2016, **Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi pada RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak)**, Ketua Komisi Pembimbing Dr. Sarwono, M.Si, Anggota Komisi Pembimbing Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS. 155 hal + xx.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) merupakan program dari Pemkot Kediri yang mengucurkan dana sebesar Rp 50.000.000/RT/tahun yang bersumber dari APBD Kota Kediri, yakni untuk merespon masyarakat untuk merencanakan apa yang mereka butuhkan dan mereka prioritas secara mandiri, khususnya dilingkungan RT yang ada di Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 01 RW 02 Kelurahan Blabak, (2) Dampak/hasil Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 dan (3) Tantangan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) kedepannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menemukan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Pembahasannya dianalisis melalui hasil wawancara serta menggunakan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi tahun 2015 belum berjalan sempurna, karena masih ada beberapa RT yang belum mengadakan rebug warga, serta sosialisasi program masih kurang sehingga menimbulkan kekurangan pemahaman sebagian masyarakat dengan maksud dan tujuan program. Partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih terbatas, karena masyarakat hanya mengusulkan dan menerima barang, sedangkan dana Prodamas di kelola oleh pihak Kelurahan. Realisasi dana Prodamas tahun 2015 berfokus pada pembangunan infrastruktur dan alat kelengkapan di tiap RT. Faktor pendukung dari Prodamas adalah adanya anggaran, antusias masyarakat tinggi dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kapabilitas dan profesionalitas semberdaya pelaksana, adanya kemungkinan untuk melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 yaitu terpenuhinya pembangunan infrastuktur berskala kecil serta terpenuhinya alat perlengkapan dilingkungan RT, sehingga hasil dari implementasi Prodamas tahun 2015 merupakan sasaran program tahun 2015. Tantangan kedepannya dari adanya Prodamas ada 3 poin yang *Pertama*, memberikan inovasi dan ide-ide kreatif kepada masyarakat; *Kedua*, tantangan di sektor ekonomi dan; *Ketiga*, menciptakan kemandirian masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah program dengan mekanisme *bottom up planning*, dimana masyarakat per RT menyusun sendiri apa yang akan diprioritaskan. Namun di tahun 2015 sosialisasi program kurang bisa diterima masyarakat secara luas, sehingga sebagian masyarakat masih belum mengerti apa maksud dan tujuan program. Saran dari penulis adalah pelaksana program harusnya lebih intensif untuk memberikan sosialisasi program, karena sosialisasi program adalah langkah awal dari implementasi program, untuk kedepannya melatih Ketua RT dan pengurus RT untuk bisa mengelola dananya sendiri secara mandiri dan bisa dipertanggungjawabkan dan menciptakan swadaya masyarakat, dimana kedepannya masyarakat tidak hanya tergantung oleh adanya program dari pemerintah, akan tetapi mereka mampu mengelola keuangan mereka sendiri.

Kata kunci: Implementasi Program, Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), Pemberdayaan Masyarakat.

SUMMARY

Muhammad Zacky Abdalla, 2016, **Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi pada RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak), Ketua Komisi Pembimbing Dr. Sarwono, M.Si, Anggota Komisi Pembimbing Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS.** 155 hal + xx.

Community Empowerment Program (PRODAMAS) is a program of the Government of Kediri city were disbursed Rp 50.000.000/ RT/year sourced from the budget of Kediri, namely to respond to the community to plan what they need and their priorities independently, especially in the environment RT in Kediri. This study aims to determine (1) Implementation of Community Empowerment Program (PRODAMAS) in RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02, Kelurahan Mojoroto and RT 01 RW 02, Kelurahan Blabak, (2) The impact/outcome Implementation of Community Empowerment Program (PRODAMAS) 2015 and (3) Challenges of Community Empowerment Program (PRODAMAS) future.

This research uses qualitative descriptive method, the research is directed to find the facts or events systematically and accurately based on the data obtained. Data collection techniques by using techniques of documentation, interviews and observation. Discussion analyzed through interviews and using interpretation.

The results showed that the process of implementation in 2015 has not been perfect, because there are still some who do not yet hold RT deliberation residents, as well as socialization program is still lacking, causing a shortage unfamiliarity some people with the intent and purpose of the program. The participation of society as a whole is still limited, because people simply proposing and receiving goods, while Prodamas fund managed by the village. Realization Prodamas 2015 fund focusing on infrastructure construction and fittings in each block. Prodamas major contributing factor is the budget, high public enthusiasm and support from the government. Whereas the inhibiting factor is the lack of capability and professionalism semberdaya executor, possibility for KKN (corruption, collusion and nepotism). Impact / outcome of the implementation of the Community Empowerment Program (PRODAMAS) 2015 is the fulfillment of small-scale infrastructure development and fulfillment fittings RT environment, so that the results of the implementation Prodamas 2015 is the target program in 2015. The challenge in the future of their Prodamas First there are 3 points, provide innovative and creative ideas to the public; Second, the challenges in the sector and the economy; Third, create community independence.

The conclusion of this research is the Community Empowerment Program (PRODAMAS) is a program with bottom-up planning mechanism, where people per RT compose yourself what would be prioritized. However, in 2015 the program socialization less acceptable to society at large, so most people still do not understand what the purpose and objectives of the program. Advice of the author is the program should be intensified to provide socialization program, because socialization program is the first step of the implementation of the program, for the future practice of RT and RT to be able to manage its own funds independently and be accountable and create a non-governmental, in which the future of society depends not only on the program of the government, but they are able to manage their own finances.

Keyword: Implementation Program, Community Empowerment Program (PRODAMAS), Community Empowerment.

SKRIPSI INI Kupersembahkan
UNTUK YANG TERSAYANG MAMA DAN ABAH
YANG SELALU ADA DARI PERTAMA AKU MENJEJAKKAN
KAKI DI DUNIA
HINGGA SAAT AKU SIAP UNTUK MENYONGSONG INDAHNYA
DUNIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODAMAS) DI KOTA KEDIRI”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku yang tercinta, Abah dan Mama (Mochamad Zainy, SH dan Wiwik Mukartini, MM) yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan kasih dan sayang, dan tentunya yang terus mendoakan, membimbing, menuntun dan mengarahkan saya pada jalan kebenaran
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Sarwono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan juga motivasi selama proses penyusunan skripsi
6. Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan juga motivasi selama proses penyusunan skripsi

7. Bapak Paulus Luhur Budi P, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang telah berbagi pengalaman dan juga ilmu kepada saya
8. Ibu Ensani, SE selaku Kasubag Tata Usaha yang memberikan bantuan dan arahan kepada saya selama proses penulisan skripsi
9. Bapak Nurali Purwanto selaku Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran yang telah bersedia menjadi narasumber saya
10. Bapak Dadiék selaku Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto yang telah bersedia menjadi narasumber saya
11. Bapak Suparmin selaku Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak yang juga telah bersedia menjadi narasumber saya
12. Keluarga besar Universitas Brawijaya, teman-teman seperjuangan kami di Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Ilmu Administrasi Publik, atas semua dukungan, semangat, doa serta kerjasamanya
13. Teman-teman Alumni SMAN 8 Kediri se-angkatan yang sampai saat ini masih memberikan dukungan dan doa
14. Serta semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Segala kekurangan yang mungkin terdapat di dalamnya ibarat pepatah mengatakan: *tiada gading yang tak retak* (segala sesuatu pasti ada kekurangannya). Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
GLOSSARY.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. PENELITIAN TERDAHULU	11
B. ADMINISTRASI PUBLIK	19
1. Konsep Administrasi Publik	19
2. Paradigma Administrasi Publik.....	21
3. Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik.....	29
C. IMPLEMENTASI PROGRAM	30
1. Pengertian Program.....	30
2. Konsep Implementasi Program	32
3. Evaluasi Program	37
4. Prosedur Evaluasi Program	39

D. PARTISIPASI MASYARAKAT	42
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	42
2. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat	46
3. Derajat Partisipasi Masyarakat.....	47
E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	51
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	51
2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	54
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	56
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	57
5. Indikator Keberdayaan Masyarakat	59
6. Filosofi Program Pemberdayaan Masyarakat	61
BAB III: METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Fokus Penelitian	67
C. Sampel Penelitian	69
D. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian.....	71
E. Jenis dan Sumber Data.....	72
F. Instrument Penelitian	72
G. Teknik Pengumpulan Data	73
H. Teknik Analisis Data.....	74
I. Keabsahan Data	77
1. Uji <i>Credibility</i> (validitas internal).....	77
2. Uji <i>Transferability</i> (validitas eksternal).....	81
3. Uji <i>Dependability</i> (reliabilitas)	82
4. Uji <i>Confirmability</i> (obyektivitas).....	82
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	83
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
1. Gambaran Umum Kota Kediri	83
a) Sejarah Kota Kediri.....	83
b) Aspek Geografi	85

c) Aspek Demografi	87
d) Visi dan Misi Kota Kediri.....	88
2. Gambaran Umum Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri.....	89
a) Visi dan Misi	89
b) Struktur Organisasi	90
c) Tugas, Pokok dan Fungsi	91
3. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).....	92
a) Latar Belakang	92
b) Maksud, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Prodamas.....	94
c) Sasaran, Alokasi dan Penggunaan Dana Prodamas	96
B. Penyajian Data.....	98
1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri	98
a) Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)	98
b) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).....	102
c) Pengelola Dana Program Pemberdayaan Masyarakat	107
d) Aktor-aktor yang Terlibat dalam Memutuskan Pendapat Terhadap Penggunaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat.....	110
e) Realisasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015.....	111
f) Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015	114
g) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).....	116
2. Dampak/Hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015	119
3. Tantangan Kedepannya dari Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri	123

C. Analisis Data	126
1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri	126
a) Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)	126
b) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).....	129
c) Pengelola Dana Program Pemberdayaan Masyarakat	130
d) Aktor-aktor yang Terlibat dalam Memutuskan Pendapat Terhadap Penggunaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat.....	131
e) Realisasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015.....	133
f) Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015	137
g) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).....	141
2. Dampak/Hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015	144
3. Tantangan Kedepannya dari Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri	148
BAB V: PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tangga Partisipasi Masyarakat	50
Tabel 2 : Zona dan Tempat Penelitian	71
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kota Kediri menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2013	87
Tabel 4 : Jumlah Kelurahan, RT dan RW di Kota Kediri Tahun 2013.....	88
Tabel 5 : Tim Pejabat Struktural PRODAMAS	102
Tabel 6 : Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.....	106
Tabel 7 : Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan	106
Tabel 8 : Realisasi Dana Prodamas Tahun 2015 RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran	111
Tabel 9 : Realisasi Dana Prodamas Tahun 2015 RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoarjo.....	112
Tabel 10: Realisasi Dana Prodamas Tahun 2015 RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Model Kesesuaian Implementasi Program.....	34
Gambar 2: Prosedur Evaluasi Program Penelitian Kualitatif.....	41
Gambar 3: Tangga Partisipasi Masyarakat	47
Gambar 4: Peta Administratif Kota Kediri	86
Gambar 5: Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Mahasiswa

Lampiran 2: Surat izin penelitian dari instansi

Lampiran 3: Foto-foto dokumentasi

Lampiran 4: Format laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial

Lampiran 5: Format surat pernyataan tanggung jawab

Lampiran 6: Format NPHD

GLOSSARY

PRODAMAS	: Program Pemberdayaan Masyarakat
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
LPMK	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RAB	: Rencana Anggaran dan Biaya
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
NHPD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu telah ditetapkan suatu pola yang menjadi pedoman berupa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaannya dilakukan melalui program pembangunan secara bertahap, berencana dan terpadu.

Sejalan berkembangnya jaman, berkembang pula pola pikir masyarakat yang semakin kritis, yang mampu memunculkan tantangan baru. Dengan munculnya tantangan-tantangan baru, maka semakin berkembangnya tugas-tugas pemerintah dalam usahanya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia. Terkait dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat, maka pemerintah harus lebih berusaha untuk meningkatkan peranannya dalam segala kegiatan maupun kebijakan yang dikeluarkan. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur perlu adanya pembangunan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial.

Kondisi masyarakat Indonesia secara fisik, ekonomi dan sosial saat ini belum sepenuhnya mencapai kesejahteraan, hal ini dibuktikan bahwa masih adanya ketimpangan. Masih banyak penduduk miskin, masih banyak

pengangguran dan masih banyak daerah tertinggal. Hal ini menjadi tugas besar yang perlu diselesaikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberikan amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi dan peran dari seluruh masyarakat, baik unsur suprastruktur maupun unsur infrastruktur. Unsur ini menyangkut pemerintah sebagai pemandu terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, serta usaha melibatkan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

Peran pemerintah daerah sebagaimana telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat guna menjalankan roda pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, sudah semestinya bertanggung jawab atas daerahnya masing-masing dengan melakukan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna mencapai masyarakat yang sejahtera.

Betapa pentingnya peran dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan aspek sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan, tidak hanya pembangunan fisik lingkungan saja, akan tetapi lebih kepada memberikan dorongan/akses agar masyarakat ke depannya lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah.

Kata “pembangunan” di Indonesia sejak beberapa dasawarsa terakhir banyak diperbincangkan oleh beberapa kalangan, baik aparat birokrat, politisi,

akademis, praktisi dan kelompok masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pembangunan yang memusatkan pada pencapaian pertumbuhan makro, ternyata justru menimbulkan banyak petaka bagi sebagian besar masyarakat yang akan diperbaiki kehidupannya. Karena itu, sejak kegagalan model pembangunan yang terlalu memusatkan pada pertumbuhan makro, banyak kalangan mengalihkan kiblatnya kepada pembangunan yang memusatkan kepada rakyat, yang di dalamnya mensyaratkan optimalisasi sumber daya lokal, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak saat itulah “pemberdayaan” dikenal di Indonesia yang telah membius banyak kalangan dan dijadikan tumpuan harapan oleh banyak pihak. Pemberdayaan telah menjelma melalui berbagai program nasional ataupun daerah sehingga hampir tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, diseluruh Provinsi maupun Kabupaten/Kota, telah dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

“Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan kepada masyarakat” (Mas’oed dalam Mardikanto, 2010: 32).

Parsons, et al dalam Mardikanto (2010: 35) mengartikan pemberdayaan sebagai berikut:

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya untuk membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2010: 36).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentu banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan dalam ketrampilan membuat *home industry*, serta kemampuan dalam berbagai bidang lainnya. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial, ekonomi, teknologi masyarakat yang masih kurang dan mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu dalam berbagai hal. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Prinsip dasar daripada pemberdayaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri.

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren, 46 Kelurahan serta memiliki jumlah RT sebanyak 1.436 RT. Sejak terpilihnya Walikota Kediri periode 2014-2019 politisi Partai PAN yaitu Bapak Abdullah Abu Bakar dan Ibu Lilik Muhibbah, mereka meluncurkan suatu program pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri yang dikenal sebagai "PRODAMAS".

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Prodamas adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan tujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan dengan cara mengucurkan dana sebesar Rp 50.000.000/RT/tahun yang dibebankan pada APBD Kota Kediri. Prodamas memiliki perincian, yakni 60 persen berupa fisik, 20 persen sosial, dan 20 persen ekonomi, realisasinya pun diserahkan kepada RT masing-masing. Pelaksanaan program itu diawasi oleh tim internal dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tim internal berperan untuk memadukan

rencana kegiatan antar-RT. Dan PPTK memiliki peran yakni mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

Namun pada implementasinya Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 di Kota Kediri masih menuai permasalahan. Seperti yang dikutip dari ADAKITANEWS 16 April 2015 :

Program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) mulai menuai masalah. Salah satu masalah itu terjadi pada proyek pembangunan saluran irigasi di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota. Dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan proposal yang diajukan warga, proyek itu berbentuk cor, namun dalam pengerjaannya saluran irigasi itu hanya dibangun dengan menggunakan batu bata. Yang lebih aneh, RT sebagai penerima program justru tidak menerima anggaran.

Proyek itu langsung dikerjakan oleh pihak kelurahan. Kami tidak tahu apa-apa, menerima anggaranpun tidak. Padahal seharusnya Prodamas itu kan program di setiap RT,” ujar Khodar, salah satu ketua RT di Kelurahan Kaliombo.

Khodar mengaku kecewa dengan sistem kerja seperti itu. Seharusnya, kata dia, untuk perencanaan, belanja dan pengerjaan program Prodamas dilakukan di masing-masing RT. “Ini sepertinya tidak sesuai dengan janji awal, bahwa semua dikerjakan ditingkat RT. Saat ini hanya belanja barang yang kecil-kecil saja kami diajak, lanjutnya. (<http://www.adakitanews.com/proyek-prodamas-mulai-bermasalah/>).

Berdasarkan kutipan diatas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat atau Prodamas di Kota Kediri. Program pemberdayaan masyarakat atau Prodamas ini perlu diimplementasikan dengan baik agar berjalan dengan efektif dan benar-benar mampu mewujudkan tujuannya. Dan pastinya masyarakat Kota Kediri bisa lebih mengenal arah atau tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi PRODAMAS di Kota Kediri sesuai dengan tujuannya, yaitu antara lain dengan mengetahui siapa saja pengelola dana Program Pemberdayaan

Masyarakat di RT, kemanfaatan dana dan realisasi dana digunakan apa saja, dan siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di setiap RT. Dan semoga setidaknya penulis bisa memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri. Selanjutnya penulisan ini akan diwujudkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak Kota Kediri ?
- 2) Bagaimanakah dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak Kota Kediri ?
- 3) Apakah yang menjadi tantangan ke depannya dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Selain dimaksudkan untuk memenuhi tugas sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak Kota Kediri berdasarkan tujuannya.
2. Ingin mengetahui dan menggambarkan dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak Kota Kediri.
3. Ingin mengetahui tantangan ke depannya dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri.

Sedangkan kegunaannya antara lain :

1. Sebagai proses belajar dan studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Bahwa sebagai suatu tulisan ilmiah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dijadikan saran atau masukan dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di tahun berikutnya.
3. Sebagai bahan bacaan ilmiah yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai berikut:

1. *Secara Akedemis*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan untuk bahan perbandingan penelitian sejenisnya dalam kaitannya dengan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat.

2. *Secara Praktis*

Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, kemampuan, dan pengetahuan setelah melaksanakan suatu studi dan perbandingan antara teori dan praktek yang ada dilapangan.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan Masalah Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang diharapkan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar, Administrasi Publik, Implementasi Program, Pemberdayaan Masyarakat, serta Partisipasi Masyarakat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Sampel Penelitian, Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Kredibilitas Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan.

BAB V: PENUTUP

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan 10 (sepuluh) jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri.

Penelitian Ahmad Suprastiyo tahun 2014 dengan judul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-M) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini membahas tentang proses implementasi program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan indikator yang pertama: a) Sosialisasi program; b) Perencanaan; c) Pelaksanaan kegiatan; dan d) Pengawasan. Hasil penelitian indikator yang pertama adalah bahwa sosialisasi program PNPM-MP di Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sudah terlaksana, pada tahap perencanaan tingkat partisipasi Rumah Tangga Miskin (RTM) belum ada, Pada tahap pelaksanaan sarana dan prasarana terdapat adanya penyimpangan hasil sarpras dari RAB dan Desain, dan Pada tahap pengawasan oleh masyarakat langsung belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dikarenakan masyarakat lebih apatis. Sedangkan pengawasan oleh pemerintah sudah berjalan dengan cukup baik. Sedangkan indikator yang adalah faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Hasil penelitian pada indikator kedua bahwa faktor pendukungnya adalah adanya anggaran, adanya

dukungan sarana dan prasarana yang memadai, adanya dukungan sumber daya alam untuk kegiatan sarpras dan akses jalan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pergantian pelaksana kegiatan, kerumitan yang melekat pada peraturan/teknis kegiatan, rendahnya komitmen para pelaku pelaksana, adanya intervensi dari lembaga sosial/pemerintah desa dan sikap pasrah dan kurang peduli dari penerima program.

Penelitian In Nimang Pangesti tahun 2009 dengan judul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-M) di Desa Senowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Penelitian ada 3 indikator. Yang pertama adalah pelaksanaan prosedur PNPM-MP di Desa Senowangi dengan hasil partisipasi masyarakat desa (musdes) Senowangi dalam musyawarah desa cukup baik dan sebagian masyarakat telah mengetahui tujuan dan maksud dari PNPM-MP. Hasil yang diperoleh dari musdes ini adalah terbentuknya Ketua dan Sekretaris TPK Desa Sonowangi. Musdes ini membicarakan tentang pertanggung jawaban semua pengeluaran keuangan yang digunakan untuk biaya bahan, upah atau ongkos, honor, penjaminan kepada kelompok, operasional dan mengevaluasi hasil pekerjaan. Dalam musdes ini juga dibicarakan kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan program serta mencari alternatif pemecahan yang diambil. Yang kedua hasil pelaksanaan PNPM-MP di Desa Senowangi adalah membuat program kegiatan rabat beton yaitu meningkatkan kualitas sarana prasarana kondisi jalan dan jembatan yang semakin baik. Program rabat beton dapat memberikan dampak ekonomi yang baik

karena kondisi jalan dan jembatan yang baik, maka masyarakat menjadi mudah dalam memasarkan hasil panen mereka.

Penelitian Henny Puspita tahun 2014 dengan judul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang dengan indikator a) Penyelenggaraan organisasi dan b) Penerapan program. Dengan hasil penelitian bahwa penyelenggara organisasi telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Namun yang menjadi kendala adalah masih adanya anggota-anggota kelompok yang tidak mengembalikan dana pinjaman.

Penelitian Siaga Basu Murbeng, Mochamad Saleh Soeaidy dan Riyanto tahun 2013 dengan judul Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PNPM MP Di Desa Bendungan Kecamatan Gondang, secara sistematis dibagi kedalam beberapa tahap di antaranya tahap perencanaan kemudian tahap pelaksanaan dan kemudian yang terakhir ialah tahap/proses pelestarian. Dalam pelaksanaannya PNPM MP di Desa Bendungan terdapat hambatan-hambatan di antaranya hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MP. Adapun beberapa program-program yang dihasilkan dengan adanya pelaksanaannya PNPM MP di Desa Bendungan adalah antara lain; 1)

pembangunan infrastruktur, adapun sasaran utamanya adalah pembuatan gorong-gorong sebagai saluran air dan rabat beton jalan alternatif desa. Hal ini sesuai sasaran pembangunan sebagaimana yang digalang pemerintah yaitu dimana pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual; dan 2) Pembangunan non-fisik, yaitu terbentuknya 3 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Tujuan dari adanya program SPP ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Bendungan khusus perempuan, karena dengan adanya kegiatan SPP ini mereka cukup mudah untuk mendapatkan modal sebagai usaha maupun untuk meningkatkan usahanya yang sudah ada.

Penelitian Fauziah Yuni Aran Tika, Imam Hanafi dan Riyanto tahun 2013 dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Batu Kota Batu). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dan faktor pendukung serta faktor penghambat terkait implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PNPM Mandiri telah dijalankan secara aktif dan mandiri serta member dampak yang positif bagi masyarakat, namun dalam proses implementasinya berjalan dengan kurang baik sebab banyak kendala yang muncul didalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu telah melaksanakan kegiatan Tridaya yang ter-diri dari kegiaitan (daya fisik/lingkungan, daya ekonomi, dan daya sosial). Kegiatan lingkungan/fisik diwujudkan dengan ke-giatan

pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, rehab/perbaiki rumah warga miskin tidak layak huni, dan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Kegiatan ekonomi bergulir yaitu bagi warga yang mempunyai usaha dan tidak mendapatkan akses pinjaman dana dari bank atau lembaga lainnya. Namun masih banyak masalah yang timbul didalam pelaksanaan kegiatan Tridaya di Kecamatan Batu Kota Batu yang antara lain adalah: a) Banyak masyarakat menganggap dana dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah dana bantuan dari pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma sehingga tidak perlu dikembalikan. Hal ini berdampak pada pengembalian atau pengangsuran dana yang macet sehingga dana ekonomi bergulir yang dikelola oleh UPK tidak dapat dikembangkan; b) Penetapan besar bunga yang dibebankan kepada masing-masing penerima manfaat tidak sama. Hal ini juga menimbulkan masalah bagi warga miskin yang kebetulan mendapatkan beban bunga lebih tinggi dibandingkan wilayah lain; c) Pemberian pelatihan yang diadakan oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) terkadang kurang sesuai dengan sumberdaya dan peluang yang ada didalam masyarakat disuatu wilayah. Hal ini membuat pelatihan-pelatihan yang diberikan dirasa percuma sebab tidak dipergunakan. Adapun faktor pendukungnya yaitu: a) Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua pihak; b) Sumber dana yang dikeluarkan dari berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pnpm mandiri perkotaan; c) Kedisiplinan masyarakat dalam mengangsur dana bergulir kegiatan ekonomi dalam PNPM mandiri perkotaan di Kecamatan Batu. Namun ada juga faktor penghambatnya yaitu: a) Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batu; b) Kurangnya tanggung jawab

sebagian masyarakat dalam pengembalian Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

Penelitian oleh Ramli tahun 2012 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Mantang Lama Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang. Dengan hasil bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) di Desa Mantang Lama Tahun 2012 pada tahap Inisiasi, tahap Perencanaan, tahap Desain, dan tahap Konstruksi partisipasi masyarakat sangat tinggi, yaitu Masyarakat sangat aktif didalam tahap ini, sedangkan pada tahap Operasional dan Pemeliharaan Partisipasi Masyarakat sangat rendah.

Penelitian Minto Hadi, M. Saleh Soeaidy dan Dimas Alif Budi N tahun 2013 dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi/pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses implementasi program. Namun hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam implementasi program tersebut kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari para penerima manfaat sehingga realisasi dari capaian program tersebut kurang mendapatkan hasil yang optimal.

Penelitian Rahayu Kristiniati tahun 2014 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Hal tersebut dikarenakan pada tahapan partisipasi yang terdiri dari tahap pemantauan dan evaluasi, tahap pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam tahap pengambilan keputusan dan tahap pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Faktor pendukung tersebut adalah komitmen kepala desa, keaktifan anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dan komitmen pelaku dan dukungan dari kelompok kepentingan. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah kurang aktifnya pengawas Unit Pengelola Keuangan sehingga ada keterlambatan dua Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pengembalian dana bergulir, keterlibatan masyarakat yang kurang merata dalam setiap kegiatan.

Penelitian Argo Prambudi dan Yogi Widagdo tahun 2013 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Desa Puluhan, Trucuk, Klaten. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Desa Puluhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan cukup berhasil karena adanya partisipasi masyarakat dan petugas pelaksana. Akan tetapi, dalam implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di desa Puluhan ini masih sebatas peningkatan dan perbaikan infrastruktur. Hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa Puluhan adalah masih kurangnya informasi kepada masyarakat desa Puluhan terkait bantuan usaha dalam program PNPM mandiri Pedesaan. Kurangnya informasi masyarakat terkait bantuan usaha dari program PNPM mandiri ini dapat dikarenakan; 1) memang tidak adanya sosialisasi itu, 2) kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, peran dan fungsi dari pemerintah daerah dan BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) sebagai pelaksana program sangatlah penting demi tercapainya tujuan dari program-program tersebut.

Penelitian Taufik Agustian, Nina Widowati dan Rihandoyo tahun 2012 dengan judul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini yaitu terbukti

bahwa ada hambatan-hambatan yang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap implementasi PNPMM di kelurahan Winong. Hambatan terbesar adalah faktor SDM masyarakat Winong yang rendah sehingga menyebabkan pola pikir masyarakat yang *profit oriented* menjadi susah berubah. Kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik juga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan oleh fasilitator tentang PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Winong.

Dari semua hasil penelitian dalam 10 (sepuluh) jurnal tersebut maka penulis mendapatkan pandangan yaitu fokus penelitian tentang implementasi/pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Sehingga memudahkan penulis dalam proses alur penulisan penelitian.

B. Administrasi Publik

1. Konsep Administrasi Negara

Konsep administrasi negara banyak menjadi sorotan bagi para ahli terutama dalam penggunaan istilah administrasi negara atau administrasi publik. Munculnya penggunaan kedua istilah tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran titik tekan dari *Administration of Public* ke *Administration by Public*, dimana dalam *Administration of Public* negara menjadi agen tunggal dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Konsep ini menekankan fungsi negara/pemerintahan bertugas sebagai

public service artinya negara/pemerintah berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Sementara *Administration by Public* menurut Utomo dalam Tahir (2014: 01) berorientasi bahwa “*Public demand are differentiated*, dalam arti fungsi negara/pemerintah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan untuk menempatkan pelanggan/masyarakat sebagai penggerak (*driving forces*)”.

Dalam Tahir (2014: 01-03) para ahli mengemukakan beberapa pengertian dari berbagai istilah administrasi negara/publik. Istilah administrasi negara (*administrasi publik/publik administration*) sangat beragam dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

1. Administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. (Siagian, 1996:8).
2. Douglas dalam Stillman (1992:2) mengemukakan “*Public administration is the produced of good and service designed to serve the need of citizen*”. Artinya, administrasi publik menghasilkan layanan yang baik yang dirancang untuk kebutuhan warga.
3. Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
4. Dubnick dan Romzek dalam Stillman II (1992:2-5), *The practice of public policy administration involves the dynamic reconciliation of various forces in government’s efforts to manage public and program*. Artinya, praktik dari kebijakan administrasi publik melibatkan rekonsiliasi dinamis dari berbagai kekuatan dalam uoaya pemerintah untuk mengelola publik/masyarakat dan programnya.
5. Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus (1960:4,5,6) mengemukakan sebagai berikut :
 - a) *Public Administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies*. Artinya bahwa administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
 - b) *Public Administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It mainly*

occupied with the dayti work of government. Artinya bahwa administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

- c) *In sum, public administration is process concerned with carrying out public policies, encompassing, innumerable skills and techniques large number of people.* Artinya, secara ringkas administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
6. Menurut Felix A. Nigro dan L. Lioyd G. Nigro mengemukakan sebagai berikut :
- a) *Public Administration is cooperative group efforts in public setting.* Artinya bahwa administrasi negara adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
- b) *Public Administration covers all three branches ; executive, legislative and yudicative, and their interrelationships.* Artinya bahwa administrasi negara meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.

Dari beberapa rumusan di atas dapat disimpulkan administrasi publik adalah berbagai aktivitas manajemen yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian serta pengawasan program pembangunan dengan melibatkan legislatif dan yudikatif serta masyarakat guna tercapainya visi dan misi pemerintah.

2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Thomas Kuhn (1970) dalam Tahir (2014: 03), mengatakan bahwa “Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu”.

Administrasi publik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan atau pergeseran secara garis besar dikemukakan oleh Keban dalam Tahir (2014: 03) bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, sebagai berikut :

- 1) Paradigma I : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
- 2) Paradigma II : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)
- 3) Paradigma III : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
- 4) Paradigma IV : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
- 5) Paradigma V : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970an)

PARADIGMA I

Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat. Sedangkan badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Senada dengan itu Ibrahim dalam Tahir (2014: 04), fokus administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi pemerintahan, sedangkan masalah pemerintahan, politik, dan kebijakan merupakan substansi ilmu politik.

Tokoh paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonald D. White. Goodnow dalam bukunya "*Politics and Administration*" (1900) berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dua fungsi pokok tersebut adalah politik dan administrasi. Politik menurut Goodnow harus melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan

negara. Sedangkan administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Penekanan paradigma I ini adalah pada lokusnya, yakni mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi berada. Menurut Goodnow administrasi Negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahannya.

Pada tahun 1926, Leonald D. White dengan bukunya *Introduction to the Study of Public Administration*, buku pertama yang keseluruhannya dipersembahkan untuk mengenalkan ilmu administrasi Negara. Dwight Waldo pernah mengatakan mengenai buku White ini bahwa sari karakter kemajuan Amerika, dan di dalam saripatinya tercermin dorongan yang umum dari bidang ini. Dorongan itu antara lain mengemukakan sebagai berikut :

- 1) Politik seharusnya tidak usah mengganggu lagi administrasi
- 2) Management memberikan sumbangan analisis ilmiahnya terhadap administrasi
- 3) Administrasi Negara adalah mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang ‘value-free’
- 4) Misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisiensi

Hasil dari paradigma pertama ini adalah memperkuat paham perbedaan dari dikotomi politik dan administrasi. Paham perbedaan ini akan nampak jelas dengan cara menghubungkannya dengan suatu koresponden antara dikotomi nilai dan praktika. Pembagian daerah analisa antara administrasi negara dan ilmu politik selama masa orientasi lokus ini nampaknya mempunyai dampak yang panjang sampai sekarang.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa bidang, yakni bidang Administrasi Negara itu di dalamnya diajarkan materi seperti : Teori Organisasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, dll. Sedangkan bidang ilmu Politik diajarkan subyek-subyek, antara lain : Teori Pemerintahan, Kepresidenan, Proses Pembuatan Undang-Undang, Politik Pemerintah Pusat dan Daerah, dll.

PARADIGMA II

Prinsip – Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Tahun 1927, W.F Willoughby dengan bukunya yang berjudul *Principles of Public Administration* yang membahas secara penuh bidang administrasi negara. Prinsip-prinsip administrasi negara yang dikemukakan oleh W.F Willoughby ini memberikan indikasi terhadap trend baru perkembangan bidang administrasi negara, sekaligus membuktikan bahwa prinsip-prinsip itu ada dan dapat dipelajari.

Pada fase paradigma kedua ini, administrasi negara benar-benar mencapai puncak reputasinya. Sekitar tahun 1930an, administrasi banyak mendapat sumbangan yang berharga dari bidang-bidang lainnya seperti industry dan pemerintahan. Itulah sebabnya lokus dari paradigma ini mudah diketahui yakni berada pada esensi prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi prinsip adalah prinsip dan administrasi adalah administrasi, maka menurut persepsi paradigma ini administrasi negara mempunyai suatu prinsip tertentu.

Prinsip-prinsip administrasi negara yang dimaksudkan tersebut ialah adanya kenyataan bahwa administrasi negara bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi atau

kerangka institusi. Ia bisa diterapkan dan diikuti di bidang apapun tanpa terkecuali. Kenyataan ini memberikan penegasan bahwa prinsip-prinsip administrasi tersebut bisa diterapkan dan dipakai oleh negara-negara yang berbeda kebudayaan, lingkungan, fungsi, misi atau kerangka institusi.

Tahun 1937 merupakan puncak akhir dari fase paradigma kedua ini. Pada tahun itu Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick mengemukakan tulisannya dalam *Paper on the Science of Administration*.

Menurut Gulick dan Urwick, prinsip adalah amat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Fokus memegang peranan penting dibandingkan atas lokus. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick adalah singkatan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting).

PARADIGMA III

Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Sebagai akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Akibat dari lompatan itu, maka terjadilah perubahan definisi lokusnya yakni birokrasi pemerintahan, dan kekurangan hubungan dengan fokusnya.

Secara singkat dikatakan bahwa fase paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Walaupun usaha untuk kembali kepada ilmu politik sebagai suatu identifikasi dari administrasi negara pada paradigma ini, akan tetapi

ilmu politik mulai melupakannya. Tahun 1962 administrasi bukan lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Tahun 1964, suatu survey yang dilakukan oleh sarjana-sarjana ilmu politik memberikan petunjuk tentang merosotnya minat terhadap administrasi negara dalam fakultas-fakultas ilmu politik. Pada tahun 1967 administrasi negara dicoret dari program pertemuan tahunan APSA (American Political Science Association). Pada akhir dasa warsa 60-an merupakan suatu saat memisahkannya administrasi negara sebagai bidang kajian dalam ilmu politik.

Ada dua perkembangan baru yang patut dicatat pada masa ini, yakni : Pertama, tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis. Kedua, timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari administrasi negara.

PARADIGMA IV

Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Timbulnya paradigma IV, sebagian sebabnya karena administrasi negara dipandang ilmu kelas dua oleh ilmu politik. Akibatnya, mereka mencari alternative pemecahannya. Nampaknya jalan yang dipilih ialah kemnali bahwa administrasi negara adalah ilmu administrasi.

Istilah ilmu administrasi dipergunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan. Terdapat pembahasan-pembahasan mengenai teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi pada intinya mendapat sumbangan pokok dari psikologi sosial, administrasi perusahaan, dan sosiologi. Sehingga dengan demikian, administrasi negara mendapatkan informasi

yang tepat untuk memahami perilaku organisasi. Adapun ilmu manajemen, tergantung pada riset yang dilakukan ahli statistic, analisa sistem, computer dan ekonomi. Sehingga karenanya administrasi negara mendapatkan informasi untuk mengukur pelaksanaan kerja secara tepat dan menaikan efisiensi managerial.

Tahun 1956 terbitlah jurnal *Administrative Science Quarterly*, sebagai sarana yang penting untuk menyuarakan pendapat dan konsepsi-konsepsi dari paradigma ini. Keiht M. Henderson berpendapat bahwa teori organisasi adalah atau seharusnya menjadi focus utama dari administrasi negara.

Di awal tahun 1960-an, "Pengembangan Organisasi" makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Pengembangan organisasi sebagai sebuah ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai: "demokratisasi" birokrasi, baik negara maupun swasta. Karena nilai-nilai inilah Pengembangan organisasi di pandang generasi muda ahli administrasi negara sebagai tawaran bidang riset yang sangat cocok dalam kerangka ilmu administrasi.

Paradigma keempat ini dalam perjalanannya miniti langkahnya, bukannya tidak mempunyai persoalan. Banyak persoalan-persoalan yang perlu dijawab, seperti misalnya jika focus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara yakni ilmu administrasi, apakah ia masih berhak berbicara tentang publik (negara) dalam administrasi tersebut ? Dan persoalan lain yang mendasar ialah bagaimanakah perbedaan yang jelas antara privat (swasta) dan publik (negara) dalam administrasi negara.

Negara dalam administrasi negara janganlah ditafsirkan dalam hubungannya dengan istilah-istilah institusi, melainkan hendaknya ia ditafsirkan secara filosofis, normative dan etis. Negara dalam hal tersebut akan menjadi sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat.

PARADIGMA V

Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970an)

Paradigma V ini lokus administrasi negara tidak semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi. Selain itu pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan teknik-teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintahan menjadi perhatian pula dalam fase paradigma V ini.

Lebih dari itu, administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah ilmu kebijaksanaan (*policy science*), politik ekonomi, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah dan analisisnya (*public policy making process*), dan cara-cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat. Aspek-aspek perhatian ini dapat dianggap dalam banyak hal sebagai suatu mata rantai yang menghubungkan antara focus administrasi negara dengan lokusnya. Sebagaimana yang terlihat dalam trend yang diikuti oleh paradigma ini, maka focus administrasi negara adalah teori organisasi, praktika dalam analisis *public policy*, dan teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Adapun lokus normatif dari administrasi negara digambarkan oleh paradigma ini ialah pada birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*).

Dalam waktu yang singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Beberapa departemen, fakultas, dan akademi baru administrasi negara dan *public affairs* bermunculan. Salah satu trend dari pertumbuhan administrasi negara ini terbentuknya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut (*The National Association of School of Public Administration*).

Demikianlah perkembangan administrasi negara baik yang diikuti lewat sejarahnya maupun lewat perkembangan paradigma. Kesemuanya itu berlatar belakang empiris dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Karena dari sanalah ilmu ini mulai di kembangkan. Belajar dari pengalaman mereka kita petik yang kita anggap baik dan bisa diterapkan dalam pertumbuhan administrasi negara kita.

3. Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik

Perkembangan ilmu Administrasi Negara telah mengalami pergeseran titik tekan dari *Administration of Public* ke *Administration by Public* dimana dalam *Administration of Public* Negara sebagai agen tunggal dalam implementasi fungsi Negara/pemerintahan. Konsep ini menekankan fungsi Negara/pemerintahan bertugas sebagai *public service (Administration for Public)*. Sementara *Administration by Public* berorientasi pada permintaan publik, dalam arti fungsi Negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada publik sebagai *driving* (penggerak). Determinasi Negara/pemerintah tidak lagi merupakan faktor utama sebagai *driving forces* (kekuatan pendorong).

Dampak dari pergeseran tersebut telah mengakibatkan perubahan makna *public* sebagai negara, menjadi *public* sebagai masyarakat. Dengan demikian pendekatan ilmu administrasi negara tidak lagi berorientasi kepada negara tetapi kepada masyarakat.

C. Implementasi Program

1. Pengertian Program

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti secara umum dan program dalam arti secara khusus. Pengertian program secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Dan pengertian program secara khusus dapat diartikan bahwa program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan orang.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan “Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan”.

Menurut Abdullah yang dikutip dari Permatasari (2014) sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam proses pelaksanaan suatu program, yaitu:

- 1) *Target groups* yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 2) Unsur pelaksanaan atau implementer, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan hingga pengawasan implementasi tersebut.
- 3) Faktor lingkungan, baik secara fisik, sosial budaya dan politik yang akan mempengaruhi proses implementasi program.

Dengan demikian perlu ditekankan bahwa program memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

- 1) Program adalah realisasi atau implementasi dari kebijakan
- 2) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan
- 3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1987;181)

harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- 2) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- 4) Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- 5) Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
- 6) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

2. Konsep Implementasi Program

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Wahab 1997: 67).

Dari pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan rencana-rencana tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran

program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

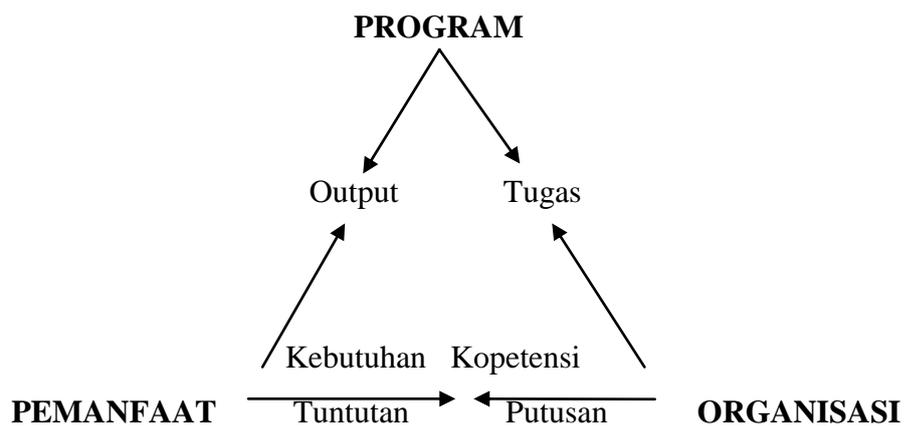
Menurut Kunarjo dikutip dari Yustiari (2012) mengatakan bahwa “program merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus”.

Menurut United Nations (1971) dalam Zauhar (1993: 02) dikutip dari Butsi (2013) menjelaskan bahwa:

Programme is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time: It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities (Program ini diartikan suatu bentuk kegiatan sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu, terbatas dalam ruang dan waktu: ini sering terjadi pada sebuah kelompok yang saling terkait proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi dan kegiatan yang sedang berjalan).

Dalam kajian implementasi program, terdapat berbagai model yang dikemukakan para ahli untuk mempermudah dalam memahami proses analisis implementasinya, salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten adalah (1) kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat), (2) kesesuaian antara

program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana, (3) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Butsi, 2013). Model kesesuaian implementasi program David C. Korten digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Berdasarkan pola yang dikembangkan David C. Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara 3 (tiga) unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program

tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Proses implementasi dalam kenyataannya dapat berhasil, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai (*outcome*). Karena dalam proses tersebut terlibat berbagai unsur yang dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian suatu program. Jadi untuk mengetahui keberhasilan program adalah dengan membandingkan antara hasil dengan pencapaian target program tersebut.

Donald P. Warwick dalam Abdullah (1988;17) mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impending conditions*).

1. Faktor Pendorong (*Facilitating conditions*)

Yang termasuk faktor-faktor pendorong adalah :

a) Komitmen Pimpinan

Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa.

b) Kemampuan Organisasi

Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau di bebaskan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (*organization capacity*) terdiri dari 2 unsur pokok yaitu :

1) Kemampuan teknis

2) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain

- c) Dukungan dari Kelompok Pelaksana
Pelaksanaan program dan proyek sering lebih berhasil apabila mendapat dukungan dari kelompok – kelompok kepentingan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan program program tersebut.

2. Faktor Penghambat (*Impending conditions*)

Yang termasuk faktor-faktor penghambat terdiri dari :

- a) Banyaknya pemain (*actor*) yang terlibat
Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam memengaruhi pelaksanaan program, maka komunikasi akan semakin rumit dalam pengambilan keputusan. Karena rumitnya komunikasi, maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan.
- b) Terdapat komitmen atau loyalitas ganda
Dalam banyak kasus, pihak pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lain.
- c) Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri
Sering sebuah program mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi, dan faktor perilaku pelaksana maupun masyarakat.
- d) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak
Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilakukan berarti makin banyak dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan program.

Jadi pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan program adalah suatu tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Dan juga bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu program harus terdapat tiga kesesuaian yaitu program itu sendiri, penerima manfaat dan organisasi yang melaksanakan.

3. Evaluasi Program

“Kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai penilaian, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu obyek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati” (Hornby dan Parnwell dalam Mardikanto, 2010: 307).

Dari contoh sederhana diatas, Mardikanto (2010: 308) berpendapat bahwa pokok-pokok pengertian tentang evaluasi mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau suatu obyek.
- 2) Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui.
- 3) Melakukan penilaian, atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.

Jika dilihat dari pendapat para pakar, terdapat beberapa definisi dari evaluasi seperti yang dikemukakan oleh Stufflebeam dikutip dari Rozak, bahwa “Evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan”. Rutman and Mowbray 1983 dikutip dari Rozak, mendefinisikan “Evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan *outcomes* suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan”. Sedangkan Chelimsky (1989) dikutip dari Rozak, mendefinisikan “Evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program”.

Dari definisi yang dikemukakan berbagai pakar di atas, bisa disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam implementasi suatu program dengan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan objek evaluasi itu sendiri.

“Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draft/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program dilaksanakan” (Mardikanto, 2010: 312).

Evaluasi program bertujuan untuk melihat apakah program dirancang, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program. Pada pelaksanaannya evaluasi program bermaksud mencari informasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan gambaran rancangan dan pelaksanaan program.

Kunarjo (2002: 265) dikutip dari Pramelia menjelaskan bahwa untuk mengevaluasi program, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendesain kegiatan program yang bersangkutan. Evaluasi program yang baik, diperlukan langkah yang sistematis, terarah dan konsisten. Untuk itu perlu ditentukan lebih dulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan program
Yang dimaksud dengan tujuan program adalah tujuan akhir atau apa yang diharapkan sebagai hasil akhir suatu pelaksanaan program tertentu. Hasil akhir ini berkaitan dengan tujuan yang telah direncanakan.
- 2) Kegiatan yang menjadi pendukung program
Kegiatan yang menjadi pendukung program adalah sarana dan prasarana yang merupakan variabel penunjang dalam rangka pencapaian sasaran.
- 3) Prosedur pelaksanaannya
Pelaksanaan yang didesain secara efektif, efisien dan konsisten untuk melaksanakan sebuah program.

- 4) Hasil yang diharapkan
Hasil dari kegiatan yang bersangkutan merupakan variabel penunjang agar sasaran program dari keseluruhan dapat tercapai. Oleh karena itu suatu program harus direncanakan *output* nya.
- 5) Memperkirakan *effect* (efek) dan *impact* (dampak) suatu program yang bersangkutan
Memperkirakan *effect* (efek) dan *impact* (dampak) suatu program yang paling sulit ditentukan. Dengan cara melakukan *survey*, wawancara dengan masyarakat dapat diketahui efek dan dampak dari pelaksanaan suatu program.

Dalam proses pengimplementasian suatu program, tentu mempunyai perbedaan dalam evaluasi. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan maksud dan tujuan dari suatu program. Misalkan saja, evaluasi dalam proses pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana hasil pemberdayaan yang telah tercapai dengan optimal sesuai dengan target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri.

4. Prosedur Evaluasi Program

Prosedur evaluasi program berdasarkan pendekatan kualitatif biasanya mulai dari mendesain, lalu menentukan sample, mengumpulkan data, kemudian dianalisis. Perbedaan yang mencolok antara pendekatan kuanlitatif dan kuantitatif adalah prosedur dalam mengumpulkan data tidak mengikuti alur tertentu yang linier artinya pengumpulan data bisa maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan informasi dan keperluan penelusuran untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan.

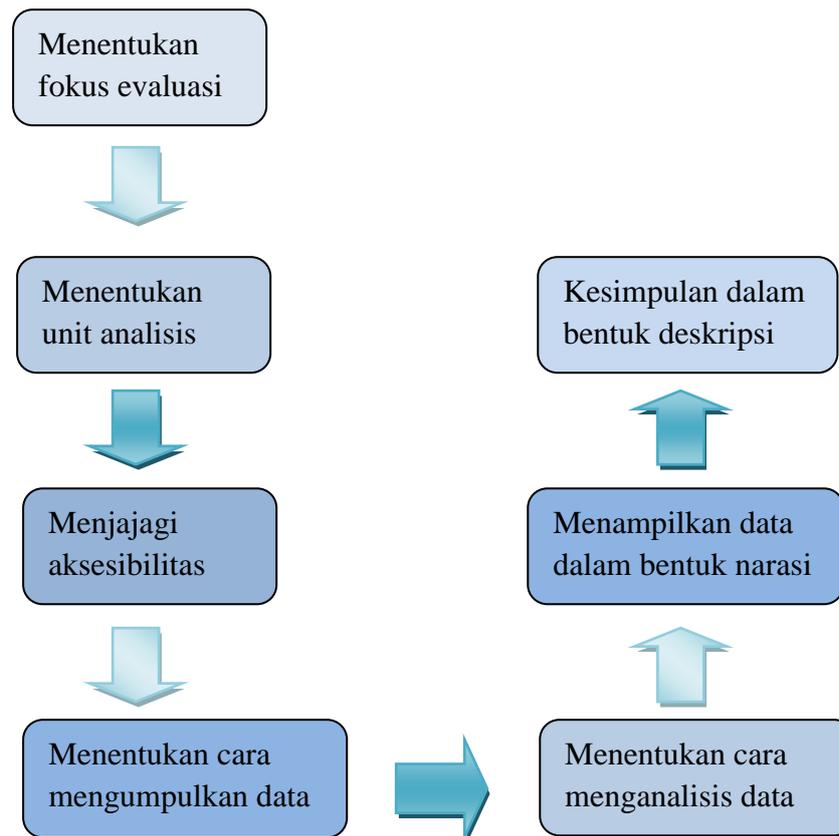
Alat pengumpul data yang digunakan pada pendekatan kualitatif bisa berupa catatan tentang kasus-kasus, pedoman wawancara, kuesioner, transkripsi rekaman suara, video, atau berupa foto, reka ulang, judicial review. Data yang terkumpul biasanya diberi kode dan diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan tingkat relevansinya dengan suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program. Data tersebut nantinya akan dianalisis dengan cara mengelompokkan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam program. Data akan disajikan dalam bentuk cerita yang rinci lengkap dengan analisis situasi dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Evaluasi semacam ini biasanya diperlukan pada program-program *tentative* atau *pilot project* yang masih ingin dicari kekuatan dan kelemahannya. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk keperluan pengembangan program dengan cakupan yang lebih luas.

Tahap-tahap evaluasi program dengan pendekatan kualitatif secara garis besar adalah : (Royse, David et al dalam Nurjhani, 2007)

- 1) Menentukan tujuan evaluasi, jangka waktu evaluasi, dan faktor pendukung lainnya seperti aksesibilitas ke dalam program.
- 2) Menentukan unit analisis yang merujuk kepada individu yang terlibat dalam program (panitia, peserta, penyandang dana, pengguna output program, serta unsur pendukung program).
- 3) Menentukan sampel, jenis data yang dikumpulkan, cara menganalisis data dan cara menyimpulkan.

Berikut akan disajikan prosedur evaluasi program yang menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih rinci dalam bentuk bagan :



Gambar 2
Prosedur Evaluasi Program Pendekatan Kualitatif

Sumber: Nurjhani (2007). Pendekatan, Desain, dan Prosedur Evaluasi Program

D. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam ensiklopedi administrasi disebutkan bahwa arti kata “*participation*” adalah sesuatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi, atau ikut sertanya bawahan dalam kegiatan organisasi. Dengan demikian partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktifitas.

Menurut Made Pidarta dalam Dwiningrum (2009: 31), partisipasi adalah:

Pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa “Pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya”.

H.A.R. Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah “Sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah

(*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya”.

Menurut Soegarda Poerbakawatja (1981: 251) partisipasi adalah “Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya”.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh 3 (tiga) faktor pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Menurut Isbandi Rukminto Adi (2007: 27) partisipasi masyarakat adalah “Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- 2) Partisipasi adalah ‘penekanan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek/program pembangunan
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek/program, supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Dengan demikian dari definisi diatas dapat dirangkum indikator partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a) Ikut serta dalam mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan langsung maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
- b) Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat.
- c) Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah.
- d) Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut.
- e) Ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama.
- f) Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan atau program yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

2. Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

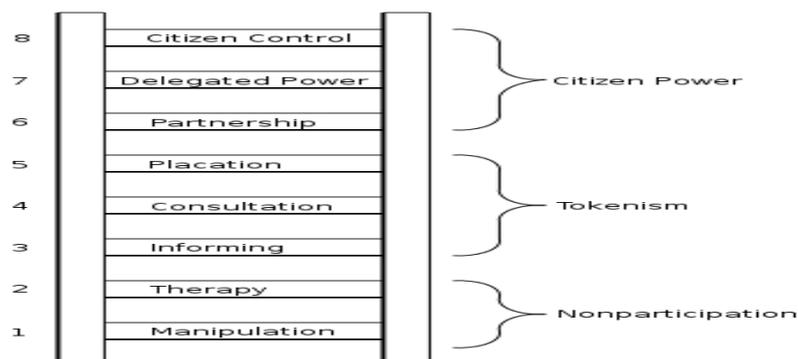
Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61) mendefinisikan ada 4 (empat) jenis partisipasi, yaitu:

- a) *Participation in decision making* (partisipasi dalam membuat keputusan) adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.
- b) *Participation in implementation* (partisipasi dalam melaksanakan) adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung dan semangat dalam berpartisipasi.
- c) *Participation in benefit* (partisipasi dalam memanfaatkan) adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Misalkan menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, gedung, jembatan dan berbagai sarana dan prasarana sosial). Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.
- d) *Participation in evaluation* (partisipasi dalam menilai) adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan dengan cara ikut serta dalam mengawasi dan menilai baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya memberikan kritikan, saran-saran atau protes.

3. Derajat Partisipasi Masyarakat

Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap pratek partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalam penelitian ini akan menggunakan konsep 8 (delapan) tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut Arnstein (1971).

Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Secara umum, dalam model ini ada 3 (tiga) derajat partisipasi masyarakat: (1) Tidak Partisipatif (*Non Participation*), (2) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*), dan (3) Kekuatan Masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*).



Gambar 3
Tangga Partisipasi Masyarakat

Sumber: Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," *JAIP*, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

Dua tangga terbawah dikategorikan dalam derajat Non partisipasi menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi dan Terapi dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk mendidik dan mengobati masyarakat. Dalam tangga pertama Manipulasi bisa diartikan tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan tangga kedua Terapi telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda partisipasi (*Degree of Tokenism*) yaitu partisipasi masyarakat telah di dengar, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ketiga yaitu *Information* (informasi) menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, artinya tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik (*feed back*), seperti hanya pengumuman, penyebaran pamphlet dan laporan tahunan. Tangga keempat yaitu *Consultation* (konsultasi) bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah, sudah ada kegiatan penjangkaran aspirasi, telah ada pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengar tetapi belum ada jaminan bahwa aspirasi tersebut akan dilaksanakan, misalnya survey warga, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga kelima yaitu *Placation* (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah,

masyarakat dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dan penentuan hasil kebijakan, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (*Degree of Citizen Power*) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat dan sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai. Pada tangga kendali warga (*citizen control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan, bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

Berdasarkan konsep yang telah dikemukakan oleh Arnstein terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu dengan yang mempunyai kekuatan nyata. Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi dari masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan. Kemudian masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh

pemegang kekuasaan, tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau program tersebut.

Jadi dari uraian diatas bisa disimpulkan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Tangga Partisipasi Masyarakat

Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
1. Citizen Power	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Control</i>) Pelimpahan Kekuasaan (<i>Delegated Control</i>) Kemitraan (<i>Partnership</i>)
2. Tokenisme	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Penentruman (<i>Placation</i>) Konsultasi (<i>Consultation</i>) Informasi (<i>Information</i>)
3. Non Participation	Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek	Terapi (<i>Therapy</i>) Manipulasi (<i>Manipulation</i>)

Sumber: Shery Arstein dalam Dwiningrum (2011:64)

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan yang mengakibatkan makin lebarnya jurang kesenjangan dan ketidakseimbangan dalam kemampuan serta kesempatan untuk mendapatkan peluang dan sumber daya yang ada. Dalam upaya mengatasi tantangan itu, diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat.

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya dan aktivitas sosialnya.

Sumodiningrat (1997) dalam Mardikanto (2010: 35), menyatakan bahwa “Hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia, dengan kata lain manusia sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial”.

“Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong/memotivasi dan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk membangkitkannya” (Kartasmita, 1996:146).

Chambers (1995) dalam Mardikanto (2010: 53) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), and *sustainable* (berkelanjutan).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Agar upaya proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan strategi untuk memberdayakan masyarakat yang menurut Kartasmita (1996) dalam Mardikanto (2010: 48), dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini didasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.
- 2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah yang nyata menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik atau sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. Terbukanya pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan. Dalam upaya memberdayakan rakyat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan serta pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.
- 3) Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.

“Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri” (Mardikanto, 2010: 38).

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *colletive action* (tindakan kolektif) dan *networking* (jaringan) sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial (Subejo dan Narimo dalam Mardikanto, 2010: 38)

Menurut Sumodiningrat (1999) dalam Mardikanto (2010: 56) bahwa:

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, akan tetapi juga pada pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan

hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena pada dasarnya, tujuan akhir daripada pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews dalam Mardikanto (2010: 120) berpendapat bahwa:

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu, prinsip akan berlaku secara umum dan dapat diterima secara umum, serta diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto (2010: 121-123)

mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, antara lain adalah :

- 1) Minat dan Kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.
- 2) Organisasi Masyarakat Bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, mulai dari keluarga/kekerabatan.
- 3) Keragaman Budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.

- 4) Perubahan Budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan budaya. Oleh karena itu, setiap implementor perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai budaya lokal.
- 5) Kerjasama dan Partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- 6) Demokrasi dalam Penerapan Ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi disini, bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sarasanya.
- 7) Belajar Sambil Bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.
- 8) Penggunaan Metoda yang Sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya) sarasanya.
- 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh/eksekutor tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasaanya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaannya.
- 10) Spesialis yang Terlatih, artinya penyuluh/eksekutor harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh/eksekutor.
- 11) Senegap Keluarga, artinya penyuluh/eksekutor harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini terkandung pengertian :
 - a) Pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga
 - b) Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama

- c) Pemberdayaan harus mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan, memperkuat persatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya
- 12) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.
Dengan adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pada bagian atas telah dikemukakan bahwa pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait hal ini, pembangunan, apapun pengertiannya yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya. Maka tujuan daripada pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan, antara lain : (Mardikanto. 2010:127)

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar dengan baik.
- 2) Perbaikan Aksesibilitas
Dengan tumbuhnya semangat belajar, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan Tindakan
Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

- 4) Perbaikan Kelembagaan
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 5) Perbaikan Usaha
Perbaikan pendidikan dengan semangat belajar, perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 6) Perbaikan Pendapatan
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 7) Perbaikan Lingkungan
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 8) Perbaikan Kehidupan
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaikan Masyarakat
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi oleh strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbicara tentang strategi pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat dalam Mardikanto (2010: 194) menyatakan bahwa:

Strategi pemberdayaan pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) arah, yaitu *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; *Kedua*, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; *Ketiga*, modernisasi

melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: (Mardikanto, 2010: 194)

- 1) Menyusun instrument pengumpulan data
Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan lapangan.
- 2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, kelompok dan masyarakat.

Dalam hubungan ini, Ismawan dalam Mardikanto (2010: 195) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia
- 2) Pengembangan kelompok
- 3) Pemupukan modal masyarakat
- 4) Pengembangan usaha produktif
- 5) Penyediaan informasi tepat guna

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, (Mardikanto, 2010: 198) menyimpulkan bahwa apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, harus memperhatikan upaya-upaya, antara lain :

- 1) Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator
- 4) Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat di daerah. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses

yang berlangsung secara alamiah, yaitu kalau yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Berkaitan dengan penetapan strategi pemberdayaan masyarakat, terlihat adanya kelemahan umum dalam penetapan strategi pemberdayaan adalah hanya memusatkan kegiatannya untuk memberdayakan pelaku utama yaitu masyarakat (Mardikanto, 2010).

Padahal keberhasilan pemberdayaan seringkali ditentukan oleh kualitas fasilitator dan persepsi pimpinan wilayah selaku penguasa tunggal dalam kedudukannya sebagai administrator pemerintahan dan administrator pembangunan. Disamping itu, keberhasilan pemberdayaan juga memerlukan dukungan dari banyak pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan atau yang akan dilaksanakan.

5. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Agar fasilitator mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima manfaat perubahan yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment indeks* atau indek pemberdayaan, antara lain: (Mardikanto, 2010: 335)

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi/bebas ke luar rumah atau tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, ke rumah tetangga, dll.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari (beras, LPG, minyak goreng, Bumbu, dll); kebutuhan dirinya (sabun mandi, rokok, bedak, sampo, dll). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri, dan terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti (TV, sepeda motor, mobil, pakaian, dll). Seperti halnya di atas, individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri, dan terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Kesadaran hukum dan politik, yaitu mengetahui nama salah satu seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, dll.
- 5) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat atau mengerti dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya: penunggakan gaji yang dilakukan di tempat kerjanya, penyalahgunaan bantuan sosial, penyalahgunaan pegawai pemerintah, dll.
- 6) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri.

Pemberdayaan masyarakat harus pula berarti membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang secara politik terisolasi bukanlah masyarakat yang berdaya, artinya tidak seluruh aspirasi dan potensinya tersalurkan. Salah satu ukurannya, adalah hak politik (mengikuti pemilu) dan hak sipil.

Lebih lanjut lagi, Mardikanto (2010: 337) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yaitu mencakup :

- 1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan
- 2) Frekuensi kehadiran tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- 3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan
- 4) Jumlah dan jenis ide baru yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian
- 5) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah
- 6) Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada dalam program pemberdayaan
- 7) Meningkatnya kemandirian masyarakat

6. Filosofi Program Pemberdayaan Masyarakat

Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto (282-286: 2010)

menjelaskan filosofi program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan, artinya program yang akan dirumuskan harus bertolak dari kebutuhan-kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat, sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai upaya pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang dikehendaki. Sehubungan dengan itu jika ada kebutuhan nyata yang hendak dinyatakan dalam program yang belum dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat, terlebih dahulu harus diupayakan menjadi kebutuhan yang dirasakan. Sebelum kebutuhan nyata tersebut belum merupakan kebutuhan yang dirasakan, sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam rumusan program, sebab tindakan seperti itu, akan mengganggu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan pemanfaatan hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut. Di lain pihak, filosofi seperti ini juga mengingatkan kepada perancang program pemberdayaan masyarakat untuk tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi harus selalu benar-benar mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan yang sudah atau sedang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah mereka untuk bekerja berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan bukan berdasarkan pendapat mereka sendiri.
- 2) Bekerja dilandasi oleh anggapan bahwa masyarakat ingin mencapai kesejahteraan, artinya setiap program haruslah benar-benar diupayakan untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, dan bukan merupakan program yang terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat demi tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh perumus program.

Karena itu, setiap perumusan program harus mampu merumuskan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat sebagai penerima manfaat. Tanpa adanya pemahaman seperti ini, niscaya program tersebut tidak akan memperoleh partisipasi masyarakat, bahkan sebaliknya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan karena program yang direncanakan itu dinilai lebih menyusahkan kehidupan mereka.

Sehubungan dengan hal ini, semua pihak yang terlibat dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat, harus membekali dirinya dengan pemahaman bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat menginginkan suatu perubahan yang menuju kearah perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan.

Berbicara tentang kesejahteraan, yang dibutuhkan bukanlah sekedar tercukupinya kebutuhan-kebutuhan fisik seperti: pangan, sandan, papan, kesehatan, dll; tetapi mereka juga menghendaki terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sosial yang berupa: keamanan, pengakuan, penghargaan/tanggapan, dan pengalaman baru.

- 3) Harus dianggap bahwa, masyarakat menginginkan kebebasan baik dalam menentukan/memilih garis hidupnya sendiri dan memutuskan bentuk-bentuk ekonomi, kepercayaan, lembaga politik dan pendidikan yang mereka inginkan demi tercapainya perbaikan mutu kehidupan mereka.

Berkenanaan dengan itu, setiap perumusan program harus sejauh mungkin mengajak mereka untuk mengemukakan kebutuhan-kebutuhannya, tujuan-tujuan yang diharapkan, serta berbagai alternatif-alternatif pemecahan masalah. Kalaupun ada perbedaan pendapat antara kehendak masyarakat dan perumus/pelaksana program, maka harus diupayakan adanya dialog atau diskusi dengan mereka untuk meyakinkan bahwa alternatif yang dikemukakan oleh perumus/pelaksana program tersebut memiliki keunggulan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dialog atau forum diskusi harus selalu disediakan untuk menghindari terjadinya pertentangan dan hambatan dalam pelaksanaan program.

Kebebasan atau forum diskusi yang disediakan itu, bukan dalam rangka agar mereka boleh menentukan pilihan-pilihannya, tetapi disediakan dalam rangka untuk keberhasilan program, dan untuk memecahkan masalah demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebab, bagaimanapun setiap pilihan yang mereka ajukan itu pasti sudah dilandasi oleh pengalaman-pengalaman, serta nilai-nilai sosial budaya yang mereka anut. Di lain pihak, rumusan program yang hanya disusun oleh pihak luar, seringkali belum dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan sosial-budaya yang dikuatkan oleh kajian empiris.

- 4) Nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya, artinya rumusan program harus sudah mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai kerjasama, keputusan kelompok, tanggungjawab sosial, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan.

Pertimbangan atas hal-hal seperti itu, di dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat seringkali memiliki arti strategis. Sebab, setiap kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat, harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai adat dan kepercayaan yang mereka bantu, dan di lain pihak, setiap keputusan yang diambil seringkali juga merupakan kelompok yang menuntut kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di dalam masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, kalau ada pengabaian terhadap hal-hal tersebut seringkali berakibat pada tidak tercapainya tujuan seperti yang diharapkan.

- 5) Membantu dirinya sendiri, artinya secara nyata warga masyarakat harus diarahkan (dilibatkan) untuk mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri setiap pekerjaan yang diupayakan untuk memecahkan masalah mereka sendiri yang akan dirumuskan dalam program.

Jika masyarakat tidak terlibat atau dilibatkan dalam proses perumusan program, seringkali pelaksanaan programnya juga tidak memperoleh partisipasi aktif dari mereka, sehingga seluruh rangkaian kegiatan sejak perencanaan sampai pelaksanaannya dilaksanakan oleh "orang luar". Dalam keadaan seperti itu, masyarakat sebagai penerima manfaat tidak dapat dikaitkan dalam proses membangun. Akibatnya, lambat laun mereka akan kehilangan kepekaan terhadap masalahnya sendiri, tidak memiliki inisiatif dan kreativitas untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan akan kehilangan kemandiriannya. Sehingga, proses pembangunan yang direncanakan justru menumbuhkan kondisi ketergantungan.

- 6) Masyarakat adalah sumberdaya yang terbesar, artinya dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat, harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia di dalam masyarakat, seperti: modal, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan yang sudah ada.

Pada hubungan ini, harus selalu diingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga, setiap upaya pembangunan harus mampu untuk menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia di masyarakat. Melalui cara seperti ini, proses pembangunan akan memberikan dampak ganda bagi tumbuhnya upaya-upaya pembangunan lanjutan di masa mendatang. Sebab, dengan tergarapnya sumberdaya alam, manusia, dan kelembagaan yang ada, akan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan masyarakat

untuk berswakarsa dan berswadaya dalam melaksanakan pembangunan di masa mendatang.

- 7) Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan dan pola pikir, artinya perumusan program harus mencakup banyak dimensi perilaku manusia. Dalam kaitan ini, harus selalu diingat bahwa setiap pembangunan, pada dasarnya harus mampu membangun manusianya. Pembangunan fisik yang tanpa membangun perilaku manusia, seringkali mengakibatkan tidak termanfaatkannya hasil-hasil pembangunan secara maksimal. Sebaliknya, melalui pembangunan yang berakibat pada perubahan perilaku manusianya, akan menghasilkan manusia-manusia yang berjiwa selalu ingin membangun, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy Moleong (1990) penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Menghendaki adanya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah, memiliki seperangkat kriteria untuk mengukur keabsahan data melalui kesepakatan antara peneliti dengan subyek yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut juga metode kualitatif. Karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015: 14).

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research*. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang

memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

Memperhatikan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dengan tujuan agar peneliti bisa menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri.

Dalam penelitian kualitatif intrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial tertentu yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat *trianggulasi*, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu data dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2015: 15).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015: 15).

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga tidak terjadi penyimpangan. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dengan satu atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2015: 296) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*, artinya bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”.

“Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan” (Sugiyono, 2015: 396).

Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri berdasarkan tujuannya
 - a) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)
 - b) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

- c) Pengelola dana Program Pemberdayaan Masyarakat
 - (1) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran
 - (2) RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto
 - (3) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak
- d) Aktor-aktor yang terlibat dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat
 - (1) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran
 - (2) RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto
 - (3) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak
- e) Realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015
 - (1) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran
 - (2) RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto
 - (3) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak
- f) Partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015
 - (1) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran
 - (2) RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto
 - (3) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak
- g) Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

2. Dampak/hasil dari implelementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015
 - a) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran
 - b) RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto
 - c) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak
3. Tantangan kedepannya dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri

C. Sampel Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yang dapat berupa lembaga pendidikan tertentu ataupun instansi lainnya, lalu peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Teknik *sampling* dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.

Dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mudah peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar/luas. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum cukup/mampu dalam memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain/narasumber lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2015: 300).

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Penelitian ini akan mengambil 3 (tiga) sampel RT (Rukun Tetangga) di Kota Kediri berdasarkan 1 RT di zona pusat kota, 1 RT zona kota tengah dan 1 RT zona kota pinggir. Dikarenakan peneliti membatasi karena Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri diikuti oleh semua RT. Berikut tempat peneliti mengambil sampel, yaitu :

Tabel 2
Zona dan Tempat Penelitian

No	Zona	Tempat
1.	Pusat Kota	RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran
2.	Kota Tengah	RT 04 RW 02 Kelurahan Mojooroto
3.	Kota Pinggir	RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Sumber: Peneliti

D. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitian, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Terkait dengan ini, Moleong (1989: 94), berpendapat bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian ini adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif, pergilah dan jejakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian yang ada dilapangan.

Berdasarkan acuan diatas, maka penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana program, dan sebagai situs penelitian yaitu RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojooroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak sebagai penerima program.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan informasi dari mana data tersebut dapat diperoleh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Misalnya dengan cara mewawancarai narasumber atau dengan cara melakukan observasi secara langsung kedalam objek penelitian (Arikunto, 2010: 22).

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti Undang-Undang, Peraturan Walikota, tabel, catatan, SMS, foto dan lain lain (Arikunto, 2010: 22).

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2015: 305-306).

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peneliti sendiri, dimana di dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai perencana, analisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai pengumpul data utama.
- 2) Pedoman wawancara, sebagai paduan atau pedoman dalam melakukan wawancara agar dalam wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan lancar.
- 3) Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan, *Handphone* (HP), dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat dan dialami dalam rangka pengumpulan data dilapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi” (Sugiyono, 2015: 309).

Dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian maka cara-cara pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan data memiliki peranan penting dalam penelitian karena kualitas data diperoleh bergantung dari cara pengumpulan datanya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, meliputi: (Sugiyono, 2015: 310-331)

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian.

- a) Observasi Terus Terang

Dalam observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber atau orang yang dianggap tahu.

- a) Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in depth interview* (wawancara mendalam), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dikutip dari Sari di dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

I. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiyono, 2015: 363-378).

1. Uji *Credibility* (validitas internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

a) Perpanjangan pengamatan

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga akan membentuk sebuah hubungan yang semakin terbuka, akrab, saling mempercayai dan tidak ada lagi informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan dengan pengujian terhadap data

yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek pengerjaan soal-soal ujian, atau meneliti kembali tulisan dalam makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

(1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian tentang implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri, maka untuk menguji kredibilitas datanya melibatkan 3 sumber yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT (RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) dan sebagian warga dilingkungan RT. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari 3 (tiga) sumber data tersebut.

(2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau kuesioner/dokumen.

(3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

d) Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bilamana peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan temuan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung pada seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

e) Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya

rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, *handphone*, atau alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f) Mengadakan *member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Uji *Transferability* (validitas eksternal)

Seperti yang telah dikemukakan, *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat di terapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Nilai *transfer* ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik/kualitatif, nilai *transfer* bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian di tempat lain.

“Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar *transferability*” (Sanafiah faisal dalam Sugiyono, 2015: 377).

3. Uji *Dependability* (reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *reliability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *reliability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi ada datanya, maka penelitian tersebut tidak reliabel. Untuk itu pengujian *reliability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

“Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan ‘jejak aktivitas lapangannya’, maka reliabilitas penelitiannya patut diragukan” (Sanafiah faisal dalam Sugiyono, 2015: 377).

4. Uji *Confirmability* (obyektivitas)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tapi hasilnya ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Kediri

a) Sejarah Kota Kediri

Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan Hindu pada abad ke-11. Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura, menurut Serat Calon Arang. Dahanapura ("Kota Api") selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Airlangga, wilayah Medang dibagi menjadi dua: Panjalu di barat dan Janggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai Kerajaan Kadiri/Kediri, dengan wilayah kira-kira Kabupaten Kediri sampai Kabupaten Madiun sekarang.

Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, ibukota Daha diserang dan kota ini menjadi kedudukan raja vazal, yang terus berlanjut hingga Majapahit, Demak, dan Mataram.

Kediri jatuh ke tangan VOC sebagai konsekuensi Geger Pecinan. Jawa Timur pada saat itu dikuasai Cakraningrat IV, adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak.

Pemberontakannya ini dikalahkan VOC, dibantu Pakubuwana II, sunan Kartasura. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya *Gemeente* Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan *Staasblad* (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. *Gemeente* ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai *Gemeente Raad* ("Dewan Kota"/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (*Europeanen*), empat orang Pribumi (*Inlanders*) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan *Staasblad* No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi "*Zelfstanding Gemeenteschap*" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).

Kediri pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 menjadi salah satu titik rute gerilya Panglima Besar Jendral Sudirman. Kediri juga mencatat sejarah yang kelam juga ketika era Pemberontakan G 30 S/PKI karena banyak penduduk Kediri yang ikut menjadi korbannya.

Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km² dan seluruh wilayahnya berbatasan

dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri terbelah oleh sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer.

Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia yaitu PT. Gudang Garam, Tbk. Pada tahun 2010, Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia yaitu *Most Recommended City for Investment* berdasarkan survey oleh SWA (majalah) yang dibantu oleh *Business Digest*, unit bisnis riset grup SWA (majalah).

b) Aspek Geografi

Kota Kediri merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya.

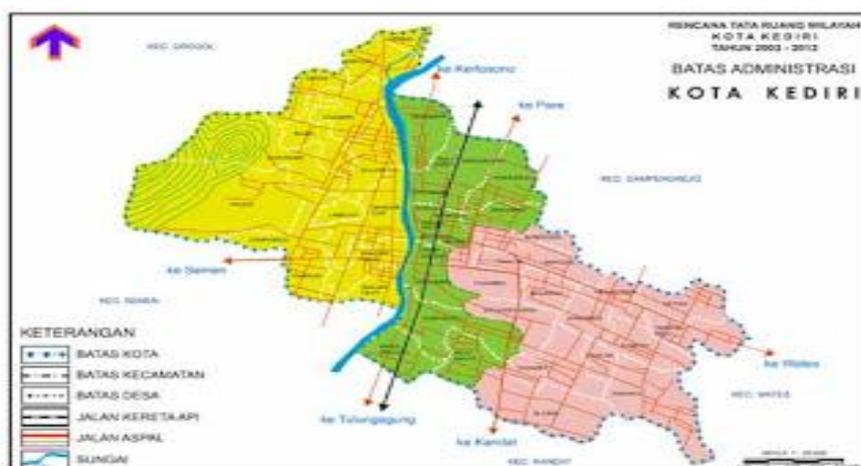
Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara $111,05^{\circ}$ - $112,03^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,45^{\circ}$ - $7,55^{\circ}$ Lintang Selatan dengan luas $63,404 \text{ Km}^2$. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian

barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m) sedang dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar. Dikaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah berupa Goa Selomangleng, goa ini merupakan pesanggrahan Dewi Kilisuci putri Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. selain itu terdapat relief kisah Patih Butho Locoyo, yang setia mendampingi Dewi Kilisuci dan simbol Butho Locoyo ini menjadi Lambang Kota Kediri.

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol
- 2) Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
- 3) Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- 4) Sebelah Barat : Kec. Banyakan dan Kec. Semen



Gambar 4
Peta Administratif Kota Kediri

Sumber: (BPS) Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Kota Kediri terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Mojoroto (Barat), dengan luas wilayah 24,601 Km² terdiri dari 14 Kelurahan
- 2) Kecamatan Kota (Tengah), dengan luas wilayah 14,900 Km² terdiri dari 17 Kelurahan
- 3) Kecamatan Pesantren (Timur), dengan luas wilayah 23,903 Km² terdiri dari 15 Kelurahan

c) Aspek Demografi

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2013 sebanyak 267.310 jiwa. Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2013 menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kota Kediri menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mojoroto	52.288	50.217	102.505
2.	Kota	42.494	43.272	85.766
3.	Pesantren	39.627	39.412	79.039
Jumlah		134.409	132.901	267.310

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Kediri

2) Jumlah Kelurahan, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) per Kecamatan di Kota Kediri

Tabel 4
Jumlah Kelurahan, RT dan RW di Kota Kediri Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	RT	RW
1.	Mojoaroto	14	458	97
2.	Kota	17	475	99
3.	Pesantren	15	492	126

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Kediri

d) Visi dan Misi Kota Kediri

Visi

“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera. Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”

Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan
- 2) Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan
- 3) Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai Pusat Pendidikan
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Wisata dan Industri Kreatif

2. Gambaran Umum Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri

a) Visi dan Misi

Visi

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Melalui Pengembangan Serta Pemanfaatan Potensi Lokal Secara Berdaya Guna, Inovatif dan Kreatif Menuju Masyarakat Kota Kediri Sejahtera”

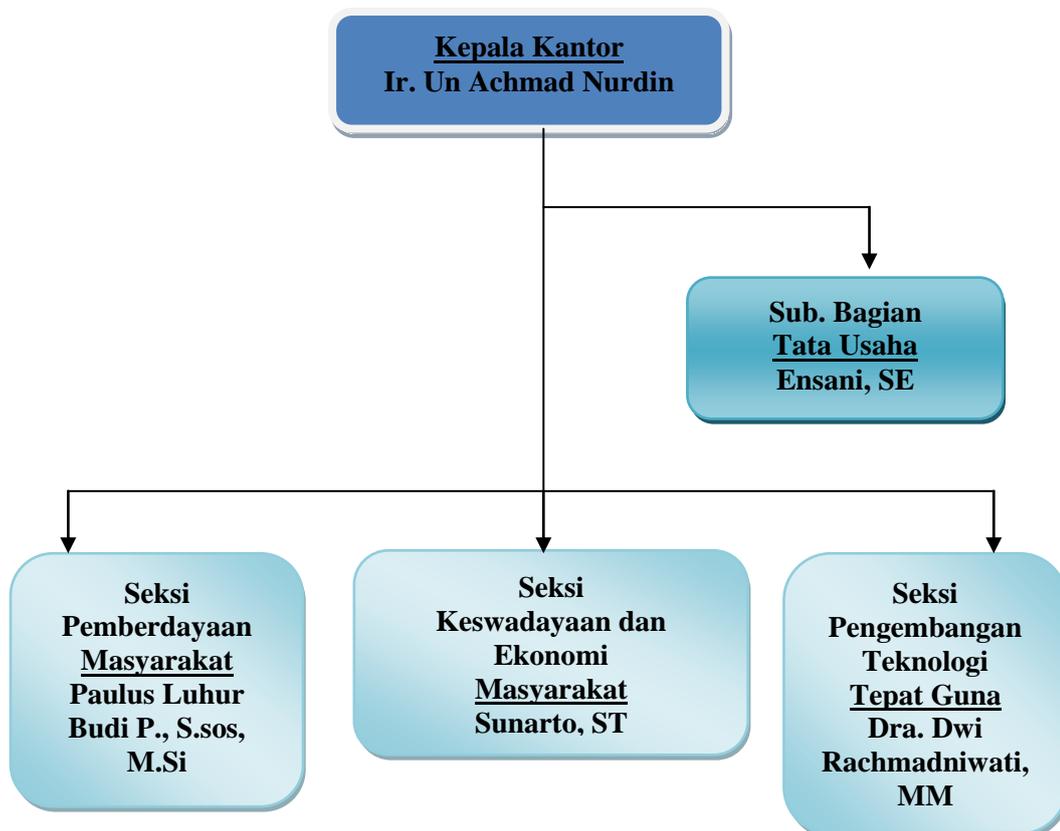
Misi

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat melalui penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pendayagunaan seluruh potensi yang ada.
- 2) Meningkatkan prakarsa dan partisipasi nyata masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kelurahan yang berhasil guna dan tepat guna.

b) Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:



Gambar 5
Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat

c) Tugas, Pokok dan Fungsi

Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan urusan pemerintahan serta pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- 5) Pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 6) Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan;
- 9) Melaksanakan penyusunan anggaran rutin/pembangunan; dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

a) Latar Belakang

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Prodamas, bermula dari pemikiran seorang Calon Walikota Kediri yaitu Bapak Abdullah Abu Bakar, SE. Dimana beliau menginginkan satu pembaruan dalam sistem pembangunan di Kota Kediri yang selama ini dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan jaman.

Pembaharuan sistem pembangunan yang dimaksud diatas adalah dari pembangunan yang bersifat *top down planning* (dari kehendak pusat/pemerintah) menjadi sistem pembangunan *bottom up planning* atau yang disebut sistem pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator.

Dalam pemikiran beliau, hal ini sangatlah tepat untuk diterapkan di era sekarang, era dimana masyarakat sudah semakin kritis dan terbuka dalam menyikapi segala permasalahan sehari-hari mulai dari masalah hidup sampai politik dan pemerintahan, untuk mulai melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dengan harapan bahwa hasil dari proses pembangunan tersebut

akan lebih mengena kepada masyarakat, lebih tepat sasaran dan pada akhirnya masyarakat sebagai konsumen akan memperoleh kepuasan dengan hasil pembangunan yang mereka nikmati.

Memang sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme *bottom up planning*, tetapi pelaksanaannya kurang maksimal dan tidak mampu mengangkat aspirasi pembangunan dari masyarakat lapisan bawah.

Bertolak dari pemikiran inilah maka beliau sebagai Calon Walikota Kediri menjanjikan satu program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) dimana Pemerintah Kota Kediri akan menganggarkan biaya pembangunan sebesar Rp 50.000.000/RT/tahun dalam APBD dan janji ini dituangkan dalam kontrak politik antara beliau dengan para ketua RT se-Kota Kediri sebagai perwakilan masyarakat.

Kemudian, setelah beliau terpilih menjadi Walikota Kediri periode 2014-2019, beliau pun segera merealisasikan janji politik tersebut dengan membuat suatu program fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan dan berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang kemudian dikenal sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).

b) Maksud, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Prodamas

Prodamas sebagai salah satu program pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek sepenuhnya, maka Prodamas dirancang dan dilaksanakan sedemikian rupa dengan maksud agar mampu semaksimal mungkin mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat, meningkatkan peran serta dan menggerakkan potensi masyarakat serta bertujuan untuk:

- 1) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya serta mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasi kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- 3) Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT; serta
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Berikutnya, dalam pelaksanaan dan pengelolaan Prodamas ditekankan penerapan prinsip-prinsip, antara lain:

- 1) Prinsip transparan dalam arti seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT;
- 2) Prinsip partisipatif dalam arti seluruh masyarakat di lingkungan RT mengambil peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan tertinggi;

- 3) Prinsip akuntabel dalam arti seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- 4) Prinsip berkelanjutan dalam arti manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan.

c) Sasaran, Alokasi dan Penggunaan Dana Prodamas

Sasaran pelaksanaan Prodamas adalah seluruh RT di wilayah kelurahan yang ada di Kota Kediri atau tepatnya 1.436 RT di tahun 2015 dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000/RT.

Adapun penggunaan dana Prodamas adalah untuk kegiatan di bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi dengan komposisi minimal 60% untuk bidang infrastruktur dan 40% untuk kegiatan di bidang ekonomi dan bidang sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan bidang infrastruktur digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum dalam skala kecil dan non bantuan langsung/tunai seperti:
 - a. Jembatan kecil/gorong-gorong;
 - b. Pengerasan jalan skala kecil;
 - c. Semenisasi jalan gang/lorong;
 - d. Pembuatan dan atau perbaikan selokan/drainase lingkungan (parit);
 - e. Perbaikan sarana lingkungan (gang);
 - f. Pembuatan posyandu yang pembiyaannya dapat dilaksanakan secara terpadu antar RT, apabila jumlah balita di satu RT belum

- mencukupi jumlah minimum 50 balita dalam satu wilayah RT;
- g. Pengadaan peralatan posyandu (meja, kursi, timbangan bayi);
 - h. Pembuatan pos kampling lingkungan;
 - i. Pembuatan taman di lingkungan RT;
 - j. Pembuatan bak sampah;
 - k. Pembuatan/pengadaan gerobak sampah;
 - l. Pembuatan dan atau pemeliharaan MCK umum;
 - m. Pembuatan jaringan air bersih skala kecil,;
 - n. Pembuatan sarana dan prasana olah raga skala kecil;
 - o. Pembuatan penerangan jalan gang (skala kecil);
 - p. Pembuatan biopori;
 - q. Pembuatan sumur resapan air dalam skala kecil;
 - r. Pembangunan/rehab sarana prasarana peribadatan; dan/atau
 - s. Pembangunan/rehab atau pengadaan sarana prasarana lain dalam bentuk skala kecil.
- 2) Kegiatan bidang ekonomi digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung/tunai seperti:
- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan;
 - b. Pelatihan berbagai jenis ketrampilan usaha dalam skala kecil;
 - c. Pengadaan bibit tanaman sayuran dan palawija, bibit ternak dan benih ikan dalam skala kecil; dan

- d. Lain-lain dalam bentuk skala kecil.
- 3) Kegiatan bidang sosial digunakan untuk penyelesaian masalah sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung/tunai seperti:
- a. Pemberian santunan natura (bantuan makanan) kepada penduduk miskin lanjut usia dalam skala kecil;
 - b. Peralatan kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil;
 - c. Peralatan kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat ditingkat RT;
 - d. Peralatan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional ditingkat RT;
 - e. Peralatan kegiatan pertemuan-pertemuan ditingkat RT; dan
 - f. Peralatan lain-lain dalam bentuk skala kecil.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri

a) Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Dalam pelaksanaan Prodamas, Kelurahan adalah *leading sector* kegiatan karena kelurahan merupakan Satker (Satuan Kerja) ujung tombak. Pemerintah Kota Kediri yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga anggaran Prodamas dialokasikan di Pos Belanja di masing-masing kelurahan.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui pada proses berlangsungnya kegiatan Prodamas, antara lain:

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan Prodamas dilakukan secara berjenjang melalui beberapa proses, antara lain:

- (a) Pengusulan dari tingkat RT yang mana usulan-usulan ditingkat RT ini haruslah merupakan hasil dari rembuk bersama warga, bukan merupakan usulan pribadi atau sekelompok warga saja dan harus dibuktikan dengan adanya daftar hadir rembuk warga lengkap dengan tanda tangan warga yang hadir;
- (b) Sinkronasi usulan perencanaan tingkat RT oleh ketua RW yang bersangkutan;
- (c) Perencanaan tingkat kelurahan;
- (d) Perencanaan tingkat kecamatan; dan

(e) Perencanaan tingkat kota.

2) Tahap Pencairan Anggaran

Setelah melalui tahap perencanaan, penyusunan dan pengesahan APBD, Kelurahan segera mengajukan permohonan pencairan anggaran Prodamas kepada instansi yang terkait dengan keuangan daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Kediri).

Untuk memudahkan dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan maka pencairan anggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dimana per tahap tiap PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mencairkan anggaran untuk 3-4 RT dari 10 RT yang menjadi tanggung jawabnya.

3) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Prodamas mencakup 3 (tiga) bidang kegiatan yaitu bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diterapkan mekanisme yang berbeda pada pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang.

Adapun mekanisme yang diterapkan sebagai berikut:

(a) Mekanisme Swakelola

Untuk pelaksanaan di bidang infrastruktur, kegiatan Prodamas dilaksanakan secara swakelola di Kelurahan dengan membentuk Tim Swakelola yang terdiri dari:

- (1) Kepala Kelurahan selaku Penanggungjawab;
- (2) Kasi Ekonomi dan Pembangunan selaku Ketua Tim Perencana;
- (3) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku Ketua Tim Pelaksana dimana pada umumnya seorang PPTK membawahi maksimal 10 RT sehingga ada lebih 1 orang PPTK Prodams pada Kelurahan yang mempunyai wilayah RT lebih dari 10;
- (4) Sekretaris Kelurahan selaku Ketua Tim Pengawas.

(b) Mekanisme Pengadaan Langsung

Untuk kegiatan di bidang ekonomi dan sosial dilaksanakan mekanisme pengadaan langsung oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan penugasan dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

B. Peran dan Tugas Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK

Dalam pelaksanaan kegiatan Prodams, Ketua RT, RW dan LPMK dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari Tim Koordinasi Prodams Tingkat Kelurahan mengingat kedudukan mereka yang sangat vital yaitu sebagai representasi masyarakat secara langsung.

Adapun tugas mereka sebagai bagian dari Tim Koordinasi Prodams Tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodams di wilayahnya;

- (b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya;
- (c) Melakukan pengendalian dan pemantauan secara *intens* pada pelaksanaan kegiatan;
- (d) Membantu dan memberikan saran masukan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan diwilayahnya.

4) Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan

Setelah semua proses baik administrasi maupun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan selesai maka selanjutnya hasil akhir pekerjaan tersebut diserahkan kepada masyarakat dengan mekanisme hibah (dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NHPD) dan bantuan sosial (dituangkan dalam berita acara serah terima barang).

Data dokumentasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan bahwa mekanisme dan tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ada 4 tahapan yaitu *Pertama*, tahap perencanaan adalah tahap awal yang disusun oleh masing-masing RT yang ada di Kota Kediri dengan cara melakukan rembuk warga; *Kedua*, tahap pencairan anggaran adalah tahap kedua setelah usulan-usulan di tingkat RT telah disetujui oleh pelaksana kegiatan; *Ketiga*, tahap pelaksanaan kegiatan adalah tahap mengimplementasikan usulan warga ditingkat RT yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial; dan *Keempat*, tahap penyerahan hasil pekerjaan yaitu tahap akhir setelah apa yang diusulkan warga telah diproses dan dilaksanakan.

b) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, sangat relevan jika dalam pelaksanaan Prodamas melibatkan berbagai aktor. Keberhasilan Prodamas untuk mencapai tujuannya memerlukan dukungan, komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar *stakeholders* yang terlibat. Tujuan dari pembentukan beberapa tim adalah untuk memantau semua kegiatan Prodamas.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) terdiri dari:

A. Tim Koordinasi Tingkat Kota

(1) Unsur Pejabat Struktural

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tim Pejabat Struktural terdiri dari:

Tabel 5
Tim Pejabat Struktural PRODAMAS

No.	Kedudukan	Jabatan
1.	Pengarah	a) Walikota Kediri b) Wakil Walikota Kediri
2.	Penanggungjawab	a) Sekretaris Daerah Kota Kediri b) Asisten Pemkot Kediri c) Asisten Perekonomian dan Pembangunan d) Asisten Administrasi Umum
3.	Ketua	a) Kepala Bappeda
4.	Wakil Ketua I	a) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

5.	Wakil Ketua II	a) Kepada Dinas Pekerjaan Umum
6.	Sekretaris	a) Sekretaris Bappeda
7.	Wakil Sekretaris	a) Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada KPM
8.	Anggota Internal:	
	a. Verifikasi Usulan	a) Kabid. Fisik dan Prasarana Wilayah pada Bappeda b) Kabid. Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah pada Bappeda c) Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda d) Kabid. Perekonomian pada Bappeda e) Kasi Sungram pada Bappeda f) Kasi Permukiman pada Bappeda
	b. Verifikator RAB (Rencana Anggaran dan Biaya)	a) Kabid. Cipta Karya pada Dinas PU b) Kabid. Bina Marga pada Dinas PU c) 10 orang staf pada Dinas PU
	c. Verifikator Keuangan	a) Kabid. Anggaran pada DPPKA b) Kabid. Perbendaharaan pada DPPKA c) Kabag. Pembangunan d) Kasi Anggaran pada DPPK
	d. Publikasi	a) Kabag. Humas dan Protokol
	e. Monitoring	a) Kasi Keswadayaan dan Ekonomi Masyarakat pada KPM b) Kasi Penerapan Teknologi Tepat Guna pada KPM c) Kasubag. TU pada KPM d) 10 orang staf pada KPM
9.	Anggota Eksternal:	
	a. Tingkat Kota	a) Ketua b) Sekretaris
	b. Kecamatan Mojoroto	a) Ketua b) Sekretaris
	c. Kecamatan Kota	a) Ketua b) Sekretaris
	d. Kecamatan Pesantren	a) Ketua b) Sekretaris

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat

(2) Tim Pendamping

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) peran pendamping merupakan salah satu faktor utama. Sebagai program yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya permasalahan-permasalahan dalam prosesnya, mengingat bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Prodamas itu sendiri sangatlah majemuk.

Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kota Kediri telah merekrut 72 orang pendamping untuk mendampingi serta membantu perencanaan dan pelaksanaan Prodamas sehingga program yang sudah berjalan ini akan mampu mencapai hasil akhir yang optimal.

Tugas yang dibebankan kepada para pendamping adalah:

1) Tahap Perencanaan Prodamas

- a) Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) infrastruktur dan membuat gambar teknis untuk kegiatan tahun berjalan dan rencana kegiatan tahun yang akan datang;
- b) Membantu Tim Perencana Kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan bidang ekonomi dan sosial.

2) Tahap Pelaksanaan Prodamas

- a) Melaksanakan pendampingan secara aktif selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan;

- b) Memberikan saran serta alternatif tindak lanjut penanganan masalah demi kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan; dan
- c) Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota Kediri.

Agar para pendamping mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan dengan maksimal, mereka harus menjalani beberapa kali bimbingan teknis untuk lebih mematangkan dan memantapkan kemampuan mereka dalam bidang teknik.

Selain itu mereka harus mengikuti kegiatan Pembangunan Karakter (*Character Building*) dimana pada kegiatan para pendamping dibekali pengetahuan dan ilmu tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat yang majemuk. Kedua macam kegiatan diatas dilakukan sebelum para pembimbing diterjunkan ke tengah masyarakat untuk menjalankan tugasnya sehingga saat mulai bertugas mereka akan siap dan melayani masyarakat dengan segala kompleksitas permasalahan didalamnya.

Peran pendamping merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program karena pendamping merupakan pengarah yang bertatap muka langsung dengan warga di setiap RT.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) membutuhkan pendampingan karena Ketua RT di seluruh Kota Kediri terdiri dari beberapa golongan profesi. Hal tersebut diperjelas oleh pendapat

Bapak Paulus Luhur Budi P., S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa:

“Untuk Tim Pendamping kita membutuhkan orang yang cakap dibidang teknik, karena ini terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dan kita juga memahami bahwa Ketua RT di seluruh Kota Kediri terdiri dari beberapa golongan profesi, ada yang PNS, TNI/POLRI, guru, pedagang, dan masih ada beberapa golongan profesi lainnya. Dengan hal itu kita melihat bahwa tidak semuanya paham tentang pengetahuan teknik dan sebagainya. Sehingga kita ambilkan Tim Pendamping ini dari lulusan-lulusan sekolah teknik, misalkan SMK Teknik ataupun Sarjana Teknik. Akan tetapi, mereka juga kita bekali untuk mengarahkan program ekonomi dan sosial. Tugas mereka antara lain membuat gambaran teknis, menyusun RAB (Rencana Anggaran dan Belanja), dan juga membantu para tukang dalam mengolah gambar yang akan dibuat dalam bentuk bangunan. Lalu setiap 1 orang pendamping maksimal mereka mendampingi 20 RT. Tetapi ada juga yang mendampingi 5-10 RT, karena kelurahannya kecil” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2016 pukul 11.54 WIB, bertempat di Kantor Pemberdayaan Kota Kediri).

B. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

Tabel 6
Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

No.	Kedudukan	Jabatan
1.	Ketua	Camat
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3.	Anggota	a) Seksi Tata Pemerintahan b) Seksi Ketentraman dan Ketertiban c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan d) Seksi Kesejahteraan Sosial e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat

C. Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan

Tabel 7
Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan

No.	Kedudukan	Jabatan
1.	Ketua	Kepala Kelurahan
2.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan
3.	Anggota	a) Ketua RT b) Ketua RW c) Ketua LPMK

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Dari data dokumentasi diatas penulis menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri terdiri dari Tim Koordinasi Tingkat Kota (Unsur Pejabat Struktural dan Tim Pendamping), Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan.

c) Pengelola Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai hasil yang efektif dan tepat sasaran, maka pengelolaan dana harus dikelola dengan baik dan tanggung jawab. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri ini memberikan hibah sebesar 50.000.000/tahun/RT.

Berikut pernyataan dari Bapak Paulus Luhur Budi P., S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mengenai pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS):

“Mengenai pengelolaan dana, ditingkat RT pun sebenarnya bisa, asalkan mampu untuk mengelola dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan maka akan ada tindakan hukum. *Nah*, bapak Walikota tidak ingin akan adanya banyak ketua RT yang dipanggil atau diperiksa oleh kejaksaan ataupun kepolisian, karena dalam pengelolaan dana terjadi kesalahan. Daripada nanti menjadi resiko ketua RT, maka pengelolaan dana ini dibentuk Tim Swakelola di Kelurahan. Tim Swakelola ini ditugaskan untuk mengelola dana Prodamas tersebut. Misalkan, RT mengusulkan sesuatu tinggal lapor Tim Swakelola, dan nanti RT tinggal menerima barang” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2016 pukul 11.54 WIB, bertempat di Kantor Pemberdayaan Kota Kediri).

Adapun pernyataan lain dinyatakan oleh 3 Ketua RT mengenai pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), antara lain:

(1) Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Berikut pernyataan dari Bapak Nurali Purwanto selaku Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran mengenai pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan dana masih di pegang oleh pihak Kelurahan dan juga PPTK. Tapi pada saat pembelanjaan barang, kita dari sini ada perwakilan, baik ada saya sendiri, perwakilan dari warga RT sendiri dan juga pihak PPTK. Sedangkan tugas daripada RT sendiri yaitu mengumpulkan usulan-usulan warga, terus diajukan kepada PPTK dan Tim Pendamping untuk diolah dan diseleksi barang mana yang akan disetujui” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.03 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran).

(2) Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojojoto

Berikut pernyataan dari Bapak Dadiiek selaku Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojojoto mengenai pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), sebagai berikut:

“Untuk tahun 2015 dana Prodamas dikelola Kelurahan, RT bersama warga hanya mengusulkan dan menerima. RT hanya bertugas untuk mengkoordinir usulan-usulan warga, mensosialisasikan Prodamas, mengawasi pembangunan fisik/infrastruktur dan mengawasi pemanfaatan bantuan Prodamas. Seperti alat kerja bakti dan alat tambal ban yang telah di usulkan” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 19.02 di rumah Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto).

(3) Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Berikut pernyataan dari Bapak Suparmin selaku Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak mengenai pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), sebagai berikut:

“Pengelolaan dana Prodamas ini di kelola oleh Kelurahan dan PPTK. Karena saya masih belum berani mengambil resiko dalam pengelolaan dananya, makanya saya serahkan kepada petugas Kelurahan, jadi saya *nggak* menanganinya sendiri. Mengenai tugas saya selaku Ketua RT waktu itu hanya menerima barang yang sudah kita usulkan. Dan juga yang terpenting saya bisa memastikan apa yang telah warga sini usulkan” (Wawancara pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 15.22 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak).

Hasil wawancara penulis dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa di Tahun 2015 pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ditingkat RT sebenarnya bisa, asalkan mampu untuk mengelola dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi nyatanya hasil wawancara penulis dari 3 Ketua RT menyatakan bahwa pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dikelola oleh pihak Kelurahan, sedangkan Ketua RT dan warganya hanya mengusulkan dan menerima saja.

d) Aktor-aktor yang Terlibat dalam Memutuskan Pendapat Terhadap Penggunaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ini adalah menggunakan mekanisme *bottom up planning* atau yang disebut sistem pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator. Dan juga di dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas ini dilakukan dengan cara rembuk bersama warga, dan tidak boleh atas dasar keputusan pribadi maupun kelompok tertentu.

Berikut hasil wawancara terkait aktor yang terlibat dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua RT sebagai berikut:

(1) Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Berikut pernyataan dari Bapak Nurali Purwanto selaku Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas adalah:

“Dalam rembuk warga, semua warga diharuskan ikut, terutama Kepala Keluarga, agar semua warga tahu apa yang telah kita rencanakan, *mas*. Selain warga, ada juga dari pihak Kelurahan, Tim Pendamping dan juga PPTK” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.03 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran).

(2) Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojojoto

Berikut pernyataan dari Bapak Dadiiek selaku Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojojoto mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas adalah:

“Pada rembug warga tahun 2015 dihadiri oleh semua pengurus RT, PKK RT dan perwakilan dari Kelurahan. Untuk Pendamping pada saat itu belum ada” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 19.02 di rumah Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto).

(3) Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Berikut pernyataan dari Bapak Bapak Suparmin selaku Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas adalah:

“Untuk tahun 2015 LPMK saja, *mas*. Karena waktu itu LPMK telah mendata usulan-usulan warga. Kalau tahun berikutnya pasti lengkap ada pihak Kelurahan, LPMK, Pendamping, dan semua warga RT sini, *mas*” (Wawancara pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 15.22 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak).

e) Realisasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Tahun 2015

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah program dari Pemerintah Kota Kediri yang mengucurkan dana dari APBD sebesar 50.000.000/RT/Tahun. Tentunya setiap RT memiliki rencana dan realisasi dana yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang telah di rencanakan bersama-sama.

Dalam penggunaan dana Prodamas terdapat 3 bidang yaitu Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial. Berikut hasil wawancara terkait kemanfaatan/realisasi dana Prodamas di 3 RT, sebagai berikut:

(1) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Untuk realisasi dana Prodamas Tahun 2015 di RT 03 RW 02

Kelurahan Banjaran adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Dana Prodamas Tahun 2015 RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

No	Bidang		
	Infrastruktur	Ekonomi	Sosial
1.	Paving jalan	Belum ada	Sembako @30 paket
2.	Perbaikan gorong-gorong dan saluran air		Peralatan anak sekolah (buku, sepatu, tas dan alat tulis) @50 paket
3.	Karpet @4 buah		Peralatan kelengkapan Posyandu
4.	Papan pengumuman		
5.	Kursi @35 buah		
6.	Meja lipat @4 buah		
7.	Sound system @1 buah		
8.	pemadam kebakaran @1 buah		

Sumber: Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

(2) Realisasi Dana Prodamas Tahun 2015 RT 04 RW 02 Kelurahan

Mojooroto

Untuk realisasi dana Prodamas Tahun 2015 di RT 04 RW 02

Kelurahan Mojooroto adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Realisasi Dana Prodamas Tahun 2015 RT 04 RW 02 Kelurahan
Mojoroto

No	Bidang		
	Infrastruktur	Ekonomi	Sosial
1.	Rehab mushola	Alat tambal ban lengkap	Persediaan makanan tambahan di Posyandu
2.	Rehab saluran air/gorong-gorong		
3.	Pembangunan pos kampling		
4.	Pot bunga @10 buah		
5.	Alat kerja bakti @1 set		

Sumber: Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto

(3) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Untuk realisasi dana Prodamas Tahun 2015 di RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Realisasi Dana Prodamas Tahun 2015 RT 02 RW 01 Kelurahan
Blabak

No	Bidang		
	Infrastruktur	Ekonomi	Sosial
1.	Karpet @1 buah	Bibit gurami	Sembako @27 paket
2.	Sound system @1 buah	Bibit lombok	
3.	Pot bunga @30 buah	Bibit sawi	
4.	Gerobak sampah @3 buah	Bibit bunga kol	
5.	Umbul-umbul @30 buah		
6.	Speaker + tiang @1 buah		

Sumber: Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Hasil wawancara dan dokumentasi di 3 Ketua RT menunjukkan bahwa di tahun 2015 realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) berfokus pada bidang infrastruktur seperti pembangunan paving jalan beserta alat-alat kebutuhan atau perlengkapan di masing-masing RT.

f) Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah suatu proses dimana sikap masyarakat ikut berperan aktif dalam menyumbangkan kreatifitas dan inisiatifnya selama program ini berlangsung. Akan tetapi, suatu program akan berjalan dengan efektif apabila partisipasi masyarakat di dalamnya aktif dalam proses berjalannya program tersebut. Seperti pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), program ini ditujukan agar semua lapisan masyarakat terutama semua warga RT di Kota Kediri turut berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Sehingga apa yang telah direncanakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.

Mengenai partisipasi masyarakat tentunya berbeda antara RT satu dengan lainnya. Seperti halnya yang telah dijelaskan berikut ini:

(1) Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Berikut pernyataan dari Bapak Nurali Purwanto selaku Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

“Partisipasi warga sini itu cukup baik, *mas*. Waktu rembug warga tahun 2015 itu, dihadiri 39 Kepala Keluarga dari 45 Kepala Keluarga. Banyak juga usulan-usulan dari warga pada waktu perencanaan. Dan juga pada saat pengerjaan paving sebagian warga sini itu ikut jadi pekerja, sedangkan tukangnyanya dari orang Kelurahan, karena disini belum ada tukang. Insya Allah kalau tahun depan ada pembangunan lagi, biar warga sini yang mengerjakan semuanya” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.03 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran).

(2) Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto

Berikut pernyataan dari Bapak Dadiék selaku Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

“Partisipasi warga sini cukup bagus, *mas*. Soalnya disini tiap bulan mengadakan pertemuan warga. Mungkin di RT lain masih jarang, *mas*. Untuk rembug warga tahun 2015 lumayan yang hadir, ada sekitar 40 Kepala Kelurga dari 100 Kepala Keluarga. Dan juga pada saat rehab mushola dan rehab saluran air, ada beberapa warga yang ikut membantu pemborong yang disiapkan oleh Kelurahan” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 19.02 di rumah Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto).

(3) Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Berikut pernyataan dari Bapak Suparmin selaku Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

“Warga sini itu belum sepenuhnya tahu, *mas*. Ya seperti yang saya katakan tadi, belum 100%. Jadi belum sepenuhnya menerima. Pokoknya *yawes* ada perubahan gitu saja, *mas*” (Wawancara pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 15.22 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak).

g) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Dalam implementasi/pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri terdapat beberapa faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi/pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), antara lain:

1. Faktor-faktor pendukung

a) Dukungan anggaran

Untuk melaksanakan suatu program harus didukung oleh sumber daya keuangan (anggaran). Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) didukung sumber daya keuangan (anggaran) sebesar Rp 50.000.000/RT/tahun yang bersumber dari APBD Kota Kediri. Namun Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah janji politik dari Walikota Kediri periode 2014-2019.

b) Adanya antusias masyarakat terhadap adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) sangat didukung oleh masyarakat, khususnya ditingkat RT. Dengan adanya anggaran per RT dari program tersebut, masyarakat bisa merancang dan merencanakan apa yang dibutuhkannya dalam rembug warga yang dilakukan oleh Ketua RT

setempat. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nanik selaku Ketua PKK dan pengurus Posyandu di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, sebagai berikut:

“Saya senang, *mas*. Dan alhamdulillah, pelaksanaannya disini juga lancar. Contohnya kemarin saya mengajukan peralatan Posyandu seperti timbangan bayi, alat pengukur tensi dan gula darah terpenuhi. Untuk berikutnya, saya beserta ibu-ibu PKK mengajukan peralatan dan pelatihan memasak, supaya ibu-ibu disini ada kegiatan. Dan semoga harapan saya dan ibu-ibu disini bisa terlaksana lagi” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 11.25 WIB, bertempat di rumah Ibu Nanik RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran).

c) Dari pemerintah sendiri

Keberhasilan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) untuk mencapai tujuannya memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kelembagaan pelaksana Prodamas merupakan faktor pendukung dari pelaksanaan program itu sendiri, sehingga peran dan tanggungjawab serta mekanisme kerja dari setiap pemangku kepentingan dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) harus bersinergi. Seperti sumberdaya PNS yang sudah mumpuni, sehingga program ini bisa terlaksana, dan juga ada beberapa pihak seperti Tim pendamping, Kelurahan serta semua Ketua RT juga harus selalu menjalin kerjasama dan komunikasi.

2. Faktor-faktor penghambat

Selain adanya faktor-faktor pendukung dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambatnya, antara lain:

A. Faktor penghambat internal

- a) Kurangnya kapabilitas dan profesionalitas sumberdaya pelaksana (Tim Pendamping, Swakelola, PPTK)
- b) Adanya kemungkinan untuk melakukan KKN
- c) Kurangnya komunikasi antar *stakeholders*

B. Faktor penghambat eksternal

- a) Kurangnya sosialisasi program, sehingga sebagian masyarakat kurang paham maksud dan tujuan program
- b) Masih ada beberapa RT yang belum melakukan rembuk warga, dan diputuskan menurut pendapat pribadi
- c) Faktor yang berbau politik, yang sulit untuk diterjemahkan karena merupakan faktor kepentingan

Dari penjelasan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) diatas, adalah merupakan hasil observasi dan wawancara.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Paulus Luhur Budi P., S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

“Di dalam pelaksanaan Prodamas ini, tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung internal yaitu kapabilitas sumberdaya PNS yang sudah mumpuni, sehingga program ini bisa terlaksana. Kalau faktor penghambat internal yaitu kapabilitas dan profesionalitas masih lemah, dan masih ada atau kemungkinan untuk melakukan KKN. Sedangkan faktor pendukung eksternal selama ini dari universitas-universitas, media, lembaga swadaya masyarakat itu banyak yang mendukung. Lalu faktor penghambat eksternal lebih kepada faktor yang berbau politis, itupun juga sulit untuk diterjemahkan karena merupakan faktor kepentingan” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2016 pukul 11.54 WIB, bertempat di Kantor Pemberdayaan Kota Kediri).

2. Dampak/Hasil dari Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015

Suatu program yang sudah direncanakan pastinya akan menimbulkan dampak/hasil dari program tersebut. Dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) sebenarnya pemerintah Kota Kediri memiliki tujuan yang baik yaitu untuk merubah sistem pembangunan yang bersifat *top down planning* (dari kehendak pusat/pemerintah) menjadi sistem pembangunan *bottom up planning* atau yang disebut sistem pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator. Sehingga dampak/hasil dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 saat ini adalah perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang ada di lingkungan RT, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dibutuhkannya. Dengan berjalannya Prodamas ini pembangunan-pembangunan berskala kecil khususnya di lingkungan RT diharapkan bisa tersentuh secara langsung dan cepat.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Paulus Luhur Budi P., S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mengenai sasaran-sasaran yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015, sebagai berikut:

“Sasaran-sasaran dari pelaksanaan Prodamas itu lebih kepada perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang ada di lingkungan RT, yang selama ini belum tersentuh. *Nah*, dengan berjalannya Prodamas Tahun 2015 ini pembangunan infrastruktur-infrastruktur berskala kecil sudah mulai tersentuh. Sehingga kalau kedepannya infrastruktur-infrastruktur sudah dirasa mencukupi, kita akan bergerak ke sektor ekonomi dan sosial” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2016 pukul 11.54 WIB, bertempat di Kantor Pemberdayaan Kota Kediri).

Adapun hasil wawancara peneliti dari 3 Ketua RT (Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) mengenai dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), adalah sebagai berikut:

1) Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Berikut pernyataan dari Bapak Nurali Purwanto selaku Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran mengenai dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Prodamas Tahun 2015 di RT sini, menurut saya sudah bisa dibilang mencukupi warga sini, seperti pembangunan infrastruktur paving jalan, inipun berguna *pas wayahe musim udan ngene mas* (bahasa jawa = pada saat musim hujan seperti ini, mas), terus beberapa usulan ibu-ibu PKK juga terpenuhi. Untuk kendala-kendala disini saya rasa tahun ini tidak ada, *mas*. Insya Allah semua lancar, karena warga sini juga merasa puas” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.03 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran)

2) Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto

Berikut pernyataan dari Bapak Dadiék selaku Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto mengenai dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), sebagai berikut:

“Manurut saya sudah berjalan dengan baik. Namun pelaksanaan di tahun 2015 ada sedikit kendala, *mas*. Yaitu persepsi masyarakat belum sama, dalam arti masyarakat belum jelas dananya itu di pakai buat apa saja. Jadi bisa saya katakan di tahun 2015 program Prodamas kurang tersosialisasi di masyarakat. Dan waktu itu pelaksanaannya pun sudah mepet” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 19.02 di rumah Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto).

3) Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Berikut pernyataan dari Bapak Suparmin selaku Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak mengenai dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan Prodamas Tahun 2015, disini memang belum maksimal, *mas*. Karena pelaksanaannya masih belum tahu dengan apa yang menjadi sasaran pemkot. Kita belum sepenuhnya tahu dananya dibuat apa saja, hanya disuruh untuk mengumpulkan beberapa usulan. Tetapi, ternyata usulan yang saya tampung, masih menyimpang. Dalam arti tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dari awal” (Wawancara pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 15.22 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak).

Namun dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 tidak semua pelaksanaan berlangsung secara baik dan tanpa rintangan. Pada kenyataannya dalam proses implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Tahun 2015 masih ada beberapa kendala-kendala seperti pada proses perencanaannya, proses pendampingan, prioritas kebutuhan dan keinginan warga dan kinerja dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku Tim Swakelola di Kelurahan.

Hal tersebut diperoleh peneliti dari wawancara bersama Bapak Paulus Luhur Budi P., S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mengenai gambaran dari dampak/hasil implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015, sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan Prodamas Tahun 2015, kita masih ada beberapa kendala-kendala pada pelaksanaannya, antara lain yang pertama adalah pada proses perencanaan, kita belum terlalu ketat untuk *me-monitoring* rembug warga, sehingga terjadilah kelonggaran. Ada yang rembug warga, ada juga yang tidak rembug warga, tapi ada berita acaranya. Lalu ada juga keputusan Ketua RT saja. Prodamas ini merupakan sistem pembangunan *bottom up planning* artinya perencanaan benar-benar dari bawah. Untuk melihat perencanaan dari bawah, itu harus ada rembug warga. Akan tetapi pada pelaksanaan Prodamas Tahun 2015 rembug warga belum dilaksanakan semaksimal mungkin. Ada beberapa RT yang masih belum mengadakan rembug warga dan dalam menyusun usulannya itu masih kehendak-kehendak pribadi. Sehingga pada Tahun 2016 ini, kita berusaha memaksimalkan, sehingga masing-masing RT harus mengadakan rembug warga. Dan yang hadir disana nanti ditentukan ada pihak Kelurahan, seluruh warga RT dan ada juga Pendamping. Untuk tahun 2015 kita serempak ada 1.436 RT di Kota Kediri.

Kendala lain yaitu terkait dengan Pendampingan yang juga kita akan koreksi. Tahun 2015 Pendamping dibawah kendali Kantor Pemberdayaan Masyarakat, namun di Tahun 2016 ini Pendamping dibawah kendali langsung oleh Lurah. Kalau dibawah kendali Kantor Pemberdayaan Masyarakat ini kurang bisa efektif karena Pendamping cenderung tunduk pada perintah yang diberikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan realitas dan tugas mereka cenderung di Kelurahan. Sehingga Kelurahan nantinya tahu kapan Pendamping harus bekerja. Dengan hal ini Kelurahan akan lebih mudah untuk mencari Pendamping.

Di Tahun 2016 ini juga telah terbit Perwali baru yaitu untuk membedakan usulan-usulan warga mengenai kebutuhan dan keinginan, karena di Tahun 2015 lalu warga cenderung mengusulkan yang sifatnya keinginan, misalnya pot bunga itu tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian bibit pertanian dan peternakan kita hentikan dulu, karena di tahun lalu terjadi kesulitan dalam pengelolaannya.

Kemudian kendala yang terakhir, kita juga akan mengoreksi kinerja dari PPTK selaku Tim Swakelola di Kelurahan. Karena kinerjanya kurang maksimal, kinerjanya lambat dan ada beberapa oknum yang tergiur untuk menggunakan uang Prodamas. Sehingga kita akan mengupayakan agar tidak terjadi celah untuk mengkorupsi uang Prodamas, seperti *me-mark up* anggaran. Dan di Tahun 2016 ini PPTK wajib mengajak Ketua RT ataupun perwalikannya pada proses pembelian barang yang telah mereka

usulkan. Sementara itu gambaran dari pelaksanaan Prodamas di Tahun 2015” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2016 pukul 11.54 WIB, bertempat di Kantor Pemberdayaan Kota Kediri).

3. Tantangan Kedepannya dari Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri

Dampak/hasil dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 seperti yang telah diuraikan diatas, itu tidak menjamin bahwa program ini akan bisa terus berjalan. Karena suatu program bisa dihentikan, apabila tidak bisa mencapai tujuannya sesuai target yang telah direncanakan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun suatu program konsepnya sudah bagus, masih terdapat tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, sekecil apapun tantangan-tantangan yang ada harus segera diselesaikan, supaya ada keberlanjutan dari program tersebut, dan tidak menyimpang dari target yang sudah direncanakan di awal.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang ada di Kota Kediri juga memiliki beberapa tantangan-tantangan antara lain yaitu memberikan inovasi atau ide-ide kreatif kepada masyarakat dan juga memberikan bimbingan dan pelatihan terkait usulan yang bersifat menumbuhkan sektor ekonomi ditingkat RT, agar usulan-usulan tersebut bisa berkelanjutan. Dan lebih pentingnya lagi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang ada di Kota Kediri bisa terlaksana sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Paulus Luhur Budi P., S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mengenai tantangan-tantangan kedepan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), berikut hasil wawancaranya:

“Jadi tantangan-tantangan kedepan dari Prodamas ini adalah bagaimana kita bisa memberikan inovasi dan ide-ide kreatif kepada masyarakat supaya ada keberlanjutan dari program ini. Bisa dibidang timbal balik dari masyarakat itu apa terhadap permintaan yang mereka susun sendiri. Contohnya, dengan adanya pos kampling, masyarakat membuat jadwal jaga, mungkin juga ditambahin kantong, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari keberlanjutannya. Tapi kalau mereka bersikap pasif, maka pos kampling yang sudah dibangun, ya sudah, dibiarkan saja. Tidak ada jadwal jaga, tidak dirawat, dan dibiarkan begitu saja. Seperti itulah tantangan kita untuk memberikan ide-ide dan bimbingan supaya mereka dapat memanfaatkan bangunan yang sudah direncanakan oleh mereka sendiri meski di danai oleh pemerintah.

Lalu tantangan di sektor ekonomi, misalnya, ada usulan-usulan untuk pelatihan menjahit, terus apakah keberlanjutannya, apakah akan menjadi sentra kampung penjahit kedepannya. Jadi seperti itulah yang merupakan tantangan kita kedepannya, setelah mereka kita bina dan usulan-usulan mereka kita realisasikan. Apalagi saat ini merupakan era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), kita akan maksimalkan lewat Prodamas ini” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2016 pukul 11.54 WIB, bertempat di Kantor Pemberdayaan Kota Kediri).

Namun dari beberapa tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan diatas, mungkin dari beberapa masukan atau harapan dari Ketua RT dibawah ini juga harus segera direspon oleh pemangku/pelaksana program. Berikut hasil wawancara peneliti dari 3 Ketua RT (Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojojoto dan Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak), sebagai berikut:

1) Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Berikut pernyataan dari Bapak Nurali Purwanto selaku Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran mengenai masukan atau harapan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) kedepannya, sebagai berikut:

“Masukan dari saya itu lebih kepada kinerja tim eksekusi lapangan, *mas*. Karena kemarin waktu membangun paving hasilnya kurang memuaskan. Bisa dibilang kurang rapilah. *Nah*, setelah melihat hasilnya ini, untuk tahun depan kalau ada pembangunan biar warga sendiri yang mengerjakannya” (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.03 WIB, bertempat di rumah Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran).

2) Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto

Berikut pernyataan dari Bapak Dadiek selaku Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto mengenai masukan atau harapan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) kedepannya, sebagai berikut:

“Yaa, harapan saya kedepannya yaitu semua usulan yang sudah disetujui lewat rembug atau musyawarah warga segera direalisasikan sesuai dengan skala prioritas. Jika kita mendesak adanya banjir, ya yang di dahulukan berarti pembangunan saluran air, karena itu merupakan skala prioritas” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 19.02 di rumah Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto).

3) Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Berikut pernyataan dari Bapak Suparmin selaku Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak mengenai masukan atau harapan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) kedepannya, sebagai berikut:

“Harapan dan masukan dari saya, ya itu *mas*, lebih kepada kesesuaian dari rembug warga, jadi apa yang sudah ada di rembug warga, itu ada hasilnya. *Wong* kemarin waktu saya ke Kelurahan, saya sebelumnya kan mengusulkan bibit ternak sebesar 13 juta, ternyata waktu saya cek disana berubah jadi 20 juta, *mas*. Saya sendiri juga *nggak* tahu siapa yang merubahnya” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2016 pukul 11.54 WIB, bertempat di Kantor Pemberdayaan Kota Kediri).

C. Analisis Data

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri

a) Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Suatu program memiliki tahapan dan mekanisme yang berbeda-beda, karena suatu program mempunyai cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri dirancang dan dilaksanakan sedemikian rupa dengan maksud agar mampu semaksimal mungkin mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat, meningkatkan peran serta dan menggerakkan potensi masyarakat serta bertujuan untuk:

- 1) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya serta mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasi kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- 3) Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT; serta
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Mekanisme dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) bermaksud untuk merubah sistem pembangunan yang bersifat *top down planning* (dari kehendak pusat/pemerintah) menjadi sistem pembangunan *bottom up*

planning. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, serta mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Dibidang pemerintahan, *bottom-up planning* adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Hal tersebut terbukti pada proses perencanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), yaitu harus mengadakan rembuk warga. Dimana Ketua RT dari masing-masing lingkungan RT harus mengumpulkan seluruh warganya untuk diajak merencanakan dan merumuskan apa saja yang dibutuhkan di lingkungan RT, sebelum akhirnya pemerintah merealisasikan apa yang telah direncanakan atau hasil dari rembuk warga tersebut.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) memiliki 4 (empat) tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Tahap perencanaan;
- 2) Tahap pencairan anggaran;
- 3) Tahap pelaksanaan kegiatan; dan
- 4) Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan

Adapun tahap perencanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang menerapkan sistem *bottom up planning*, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusulan dari tingkat RT yang mana usulan-usulan ditingkat RT ini haruslah merupakan hasil dari rembug bersama warga, bukan merupakan usulan pribadi atau sekelompok warga saja dan harus dibuktikan dengan adanya daftar hadir rembug warga lengkap dengan tanda tangan warga yang hadir;
- 2) Sinkronasi usulan perencanaan tingkat RT oleh ketua RW yang bersangkutan;
- 3) Perencanaan tingkat kelurahan;
- 4) Perencanaan tingkat kecamatan; dan
- 5) Perencanaan tingkat kota.

Berangkat dari usulan-usulan ditingkat RT dalam proses perencanaan, disinilah sistem *bottom up planning* terlihat. Yang maka usulan-usulan tersebut benar-benar disusun dari bawah, dengan cara melalui rembug/musyawarah warga di masing-masing lingkungan RT.

Namun untuk memaksimalkan sistem *bottom up planning*, diperlukan persiapan yang matang, agar apa yang menjadi maksud dan tujuan program bisa terserap oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan sosialisasi secara intensif mengenai maksud dan tujuan suatu program ke semua lapisan masyarakat, supaya masyarakat mengenal dan benar-benar paham dari esensi program yang akan diimplementasikan. Sehingga ditahap implementasi masyarakat sudah benar-benar paham mengenai regulasinya serta langkah-langkah apa saja yang akan direncanakan.

b) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) menggunakan sistem *bottom up planning*, jadi wajar kalau banyak pihak/*stakeholders* yang terlibat, karena sistem *bottom up planning* melibatkan semua pihak, baik dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri, antara lain yaitu:

- 1) Tim Koordinasi Tingkat Kota (Unsur Pejabat Struktural dan Tim Pendamping);
- 2) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan; serta
- 3) Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan

Namun semakin banyak pihak yang terlibat justru menjadi salah satu faktor penghambat dalam tahap implementasi suatu program. Hal ini dinyatakan oleh pendapat Donald P. Warwick dalam Abdullah (1988: 17) menyatakan bahwa:

Salah satu faktor penghambat dalam tahap implementasi program adalah banyaknya pemain (*actor*) yang terlibat. Dalam arti, Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam memengaruhi pelaksanaan program, maka komunikasi akan semakin rumit dalam pengambilan keputusan. Karena rumitnya komunikasi, maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan.

Mungkin dengan adanya pendapat dari Donald P. Warwick diatas, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) disusun secara lebih efektif dan efisien lagi, agar lebih memudahkan dalam komunikasi dan meminimalisasi adanya hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Namun apabila pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rogram Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) diatas bisa menjaga komunikasi dengan baik dan bersinergi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaannya.

c) Pengelola Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah program kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan tujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan dengan cara mengucurkan dana sebesar Rp 50.000.00/RT/tahun. Dengan dana tersebut diharapkan pembangunan benar-banar dimulai dari lapisan bawah, atau sistem *bottom up planning*. Namun pengelolaan dana tersebut harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Hasil dari wawancara peneliti baik dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 3 Ketua RT (Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) dapat disimpulkan bahwa yang mengelola dana Prodamas Tahun 2015 di masing-masing lingkungan RT, yaitu Tim Swakelola dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Kelurahan. Tim Swakelola ini ditugaskan untuk mengelola dana Prodamas tersebut dan PPTK ditugaskan bersama Ketua RT atau perwakilannya untuk membelanjakan uang tersebut hingga berbentuk barang.

Mengenai pengelola dana Prodamas ini terdapat aturan hukum, apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan dananya. Maka dari itu, banyak Ketua RT yang belum berani mengambil resiko dalam mengelola dana Prodamas dilingkungan RT. Walaupun dana Prodamas tersebut benar-benar ditujukan di seluruh RT yang ada di Kota Kediri.

Dari observasi peneliti di lingkungan RT mengenai pengeloaan dana, bahwa belum ada kelompok khusus di lingkungan RT yang ditugaskan untuk mengelola dana tersebut, sehingga dana tersebut dikelola di Kelurahan, yang dibebankan pada Tim Swakelola. Sehingga dengan tidak adanya kelompok pengelola dana dilingkungan RT, Ketua RT tidak berani mengelola dana itu sendiri. Kalaupun mungkin di lingkungan RT sudah terdapat kelompok khusus yang mengelola dana Prodamas, tidak menutup kemungkinan setiap RT bisa mengelola dana Prodamas secara mandiri dan bisa dipertanggungjawabkan.

d) Aktor-aktor yang Terlibat dalam Memutuskan Pendapat Terhadap Penggunaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam memutuskan suatu pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas, itu harus ada rembug warga. Dimana rembug warga ini berfungsi untuk menampung usulan-usulan dari setiap warga di lingkungan RT, sebelum direalisasikan oleh pemerintah. Jadi setiap RT yang ada di Kota Kediri wajib untuk mengadakan rembug warga, walaupun di Tahun 2015 masih ada beberapa RT yang belum mengadakan rembug warga.

Dari hasil wawancara di 3 lingkungan RT (RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas, di bentuklah forum rembuk warga, dimana usulan atau pendapat warga ditampung dan diputuskan. Maka dari itu di dalam rembuk warga dalam memutuskan pendapat ada 2 (dua) aktor yang terlibat baik aktor dari masyarakat dan aktor dari pemerintah antara lain yaitu Ketua RT bersama warganya terutama Kepala Keluarga, Tim Pendamping, PPTK dan Tim Swakelola dari Kelurahan. Dari hasil tersebut terbukti bahwa di dalam memutuskan pendapat terhadap dan Prodamas adalah mutlak dari usulan-usulan warga di masing-masing RT, sehingga peran dari pemerintah hanya sebagai fasilitator dan pengarah terhadap apa yang telah di usulkan dari masing-masing RT di Kota Kediri.

Dengan adanya aktor-aktor yang terlibat dalam memutuskan pendapat terhadap penggunaan dana Prodamas baik dari aktor masyarakat maupun aktor dari pemerintah yang berada dalam satu forum, diharapkan agar terjadi komunikasi yang bersinergi antar aktor-aktor tersebut.

e) Realisasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Tahun 2015

Dana Prodamas adalah dana sebesar Rp 50.000.000/tahun yang dianggarkan kepada masing-masing RT di Kota Kediri. Di dalam merealisasikan dana Prodamas, tentunya akan berbeda-beda antara satu RT dengan RT lainnya, karena kebutuhan yang diprioritaskan di masing-masing lingkungan RT berbeda-beda. Adapun dalam merealisasikan dana Prodamas Tahun 2015 adalah untuk kegiatan di bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi dengan komposisi minimal 60% untuk bidang infrastruktur dan 40% untuk kegiatan di bidang ekonomi dan bidang sosial.

Bidang infrastruktur ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum dalam skala kecil dan non bantuan langsung/tunai. Bidang ekonomi ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung/tunai. Sedangkan bidang sosial ditujukan untuk penyelesaian masalah sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung/tunai.

Namun dalam merealisasikan dana Prodamas masing-masing RT di Kota Kediri diberikan kewenangan, baik akan diprioritaskan di bidang infrastruktur, bidang ekonomi maupun bidang sosial. Tergantung dengan apa yang benar-benar diprioritaskan di masing-masing lingkungan RT.

Mencermati hasil penelitian diatas mengenai realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 di 3 RT (RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak), maka dapat disimpulkan bahwa:

1) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran lebih banyak berfokus pada sektor infrastruktur, antara lain yaitu paving jalan, perbaikan saluran/gorong-gorong air, serta alat kelengkapan di lingkungan RT. Sektor ekonomi di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran belum ada program. Serta di sektor sosial seperti pembagian sembako untuk keluarga kurang mampu, pembagian alat kelengkapan sekolah untuk anak-anak, dan alat kelengkapan untuk Posyandu.

2) RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto

Realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 di RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto di bidang infrastruktur adalah untuk merehab mushola, merehab saluran air/gorong-gorong yang merupakan skala prioritas, karena di musim hujan jalanan terendam air, pembangunan pos kampling, pot bunga, dan alat kerja bakti. Di bidang ekonomi yaitu ada alat tambal ban lengkap, alat ini nantinya akan dioperasikan oleh warga, dan hasilnya dibagi antara orang yang mengoperasikan dan untuk kas RT. Serta di bidang sosial yaitu persediaan makanan tambahan di Posyandu.

3) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 di RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak juga lebih banyak digunakan pada sektor infrastruktur, akan tetapi lebih kepada peralatan kelengkapan di lingkungan RT. Sektor ekonomi juga sudah mulai tersentuh, seperti pengadaan bibit, sehingga pada musim panen sudah bisa dijual, hasilnya pun masuk kas RT. Untuk sektor ekonomi yaitu pembagian sembako untuk warga di lingkungan RT yang kurang mampu.

Jadi dari realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 di 3 RT (RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) diatas berfokus pada perbaikan di bidang infrastruktur seperti pembangunan berskala kecil dan alat kelengkapan di masing-masing RT.

Ditinjau dari tujuan daripada pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto. Maka tujuan dari pemberdayaan bukanlah berfokus pada perbaikan infrastruktur, akan tetapi meliputi beragam upaya perbaikan , antara lain :

- 1) Perbaikan pendidikan
- 2) Perbaikan Aksesibilitas
- 3) Perbaikan Tindakan
- 4) Perbaikan Kelembagaan
- 5) Perbaikan Usaha
- 6) Perbaikan Pendapatan
- 7) Perbaikan Lingkungan
- 8) Perbaikan Kehidupan
- 9) Perbaikan Masyarakat

Berdasarkan salah satu filosofi program pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto, bahwa adanya program pemberdayaan masyarakat bukanlah hanya meliputi pembangunan fisik saja, akan tetapi diimbangi dengan pembangunan manusianya juga. Dalam kaitan ini, setiap pembangunan pada dasarnya harus mampu membangun manusianya. Pembangunan fisik yang tanpa membangun manusia, seringkali mengakibatkan tidak termanfaatkannya hasil-hasil pembangunan secara maksimal. Sebaliknya, melalui pembangunan yang berakibat pada perubahan perilaku manusianya, akan menghasilkan manusia-manusia yang berjiwa selalu ingin membangun, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, Program pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri kedepannya juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan juga pembangunan manusianya.

f) Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015

Menurut Made Pidarta dalam Dwiningrum (2009: 31), partisipasi adalah:

Pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri bertujuan untuk menampung usulan-usulan masyarakat dilingkungan RT yang diperoleh dari rembuk warga, lalu direalisasikan dengan apa yang telah disepakati bersama. Partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015 belum sepenuhnya maksimal. Hal ini diperoleh dari wawancara 3 Ketua RT (Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) menyatakan bahwa pada saat rembuk warga, warga lingkungan RT belum sepenuhnya hadir. Artinya masih ada beberapa warga yang belum ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan.

Walaupun warga dilingkungan RT belum sepenuhnya ikut berpartisipasi, namun Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ini bertujuan untuk melibatkan sejumlah pihak, baik dalam proses perencanaan maupun pada proses pelaksanaan.

Jika dilihat dari tangga derajat partisipasi masyarakat yang di kemukakan oleh Arstein, maka partisipasi masyarakat Tahun 2015 dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) masuk tangga kelima yaitu *Placation*

(penentruman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dan penentuan hasil kebijakan, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan. Hal ini dibuktikan bahwa pada proses perencanaan tiap RT di Kota Kediri harus mengadakan rembug warga. Dimana pada saat rembug warga ada komunikasi langsung dari pihak pemerintah (pihak kelurahan dan tim pendamping) dan pihak masyarakat (Ketua RT dan warganya). Serta usulan-usulan dari masyarakat secara lebih signifikan adalah merupakan *output* dari adanya rembug warga, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan, karena usulan dari masyarakat tersebut akan dikoreksi lagi oleh pemerintah. Jika telah sesuai maka akan direalisasikan, walaupun tidak sesuai akan diubah dengan yang lainnya.

Namun jika dilihat dari sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61) yang mendefinisikan ada 4 (empat) jenis partisipasi, maka hal tersebut mengacu terhadap partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan/implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), yaitu antara lain:

- (1) *Participation in decision making* (partisipasi dalam membuat keputusan) adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan

mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis. Contoh: Dengan adanya forum rembuk warga di masing-masing lingkungan RT, diharapkan masyarakat aktif dalam berpartisipasi dalam membuat perencanaan yang diprioritaskan di lingkungannya. Hal ini membuktikan bahwa peran masyarakat diikuti sertakan dalam membuat keputusan.

- (2) *Participation in implementation* (partisipasi dalam melaksanakan) adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung dan semangat dalam berpartisipasi.

Contoh: Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, bahwa warga lingkungan RT tersebut juga turut membantu dalam pengerjaan paving. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat juga turut menyumbangkan tenaganya terhadap apa yang telah mereka usulkan di lingkungannya.

- (3) *Participation in benefit* (partisipasi dalam memanfaatkan) adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Misalkan menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, gedung, jembatan dan berbagai sarana dan prasarana sosial). Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.

Contoh: Dengan adanya paving jalan, warga sekitar RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, tidak khawatir saat musim hujan, dan juga paving jalan tersebut bisa mengantisipasi jalanan tergenang air. Dan juga di RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak, memanfaatkan adanya bibit gurami, lombok, sawi dan bunga kol untuk pertanian, agar nanti hasilnya bisa dijadikan uang kas di lingkungan RT. Dengan adanya Prodamas ini masyarakat dirasa cukup dalam memanfaatkan hasil yang telah mereka rencanakan.

- (4) *Participation in evaluation* (partisipasi dalam menilai) adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan dengan cara ikut serta dalam mengawasi dan menilai baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya memberikan kritikan, saran-saran atau protes.

Contoh: Pada saat rembuk warga, masyarakat dibebaskan dalam memberikan saran-saran ataupun pendapat mereka.

Jadi bisa disimpulkan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri yakni bisa meningkatkan derajat partisipasi masyarakat baik dalam keterlibatan membuat keputusan, keikutsertaan dalam melaksanakan, memanfaatkan apa yang telah mereka usulkan, serta diberikan kebebasan dalam menilai (saran, kritikan) terhadap program tersebut. Namun suatu program pada dasarnya harus ada partisipasi dari masyarakat, sehingga hal ini akan membuat suatu program bisa terus berkelanjutan sampai dengan tujuannya.

Jika dikaitkan dengan salah satu filosofi program pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto, bahwa dalam tahap perencanaan harus butuh partisipasi masyarakat. artinya secara nyata warga masyarakat harus diarahkan (dilibatkan) untuk mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri setiap pekerjaan yang diupayakan untuk memecahkan masalah mereka sendiri yang akan dirumuskan dalam program, sehingga akan menimbulkan tujuan yang akan dicapai bersama.

g) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Efektivitas implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, memperhitungkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyusun strategi implementasi yang efektif, yaitu mendapatkan keuntungan dari faktor pendukung yang berupa kekuatan dan peluang serta meminimalkan atau mengatasi faktor penghambat yang berupa kelemahan dan tantangan. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memperlancarkan jalannya suatu program. Mencermati hasil dari penelitian yang termasuk faktor pendukung dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri antara lain yaitu adanya dukungan anggaran sebesar Rp 50.000.000/RT/tahun, dukungan dari pemerintah Kota Kediri sendiri dengan cara menyiapkan sumberdaya pelaksana yang professional serta antusias masyarakat terhadap pemanfaatan anggaran dari adanya Prodamas tersebut. Serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Tahun 2015 juga telah menyentuh pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang belum tersentuh sebelumnya, khususnya di masing-masing lingkungan RT yang ada di Kota Kediri.

Namun dalam pelaksanaan suatu program tidak semua pelaksanaannya berlangsung secara baik dan tanpa rintangan. Ada juga faktor penghambat dari implementasi suatu program. Faktor penghambat ini terdiri dari faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Dari hasil penelitian yang merupakan faktor penghambat internal dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) antara lain yaitu kurangnya kapabilitas dan profesionalitas sumber daya pelaksana, adanya kemungkinan untuk melakukan KKN dan kurangnya komunikasi antar *stakeholders*. Dari beberapa faktor penghambat internal tersebut ada yang perlu dibenahi khususnya sumberdaya pelaksana perlu diadakan seleksi khusus sesuai dengan bidangnya. Karena sumberdaya pelaksana merupakan salah satu dari kunci keberhasilan suatu program. Maka dari itu sumberdaya pelaksana perlu orang yang tepat di tempat yang tepat (*the right man in the right place*). Lalu dalam penggunaan anggaran perlu adanya transparansi (keterbukaan), agar dapat meminimalisasi adanya tindakan KKN. Serta perlu membangun komunikasi antar *stakeholders*, agar sinergitas antar lini yang terlibat dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).

Adapun faktor penghambat eksternal dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) antara lain yaitu adanya adanya ketidaksesuaian barang yang telah direncanakan warga dengan barang yang diterima warga, masih ada beberapa RT yang belum melakukan rembug warga, dan diputuskan menurut pendapat pribadi, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti rembug warga, serta faktor yang berbau politik yang sulit untuk

diterjemahkan karena merupakan faktor kepentingan. Dari beberapa faktor penghambat tersebut perlu adanya pembenahan yaitu pada konsistensi antar *input* dan *output*. *Input* adalah hasil dari rencana warga dalam rembug warga, sedangkan *output* adalah barang yang telah diterima oleh warga dilingkungan RT. Artinya harus ada kesamaan antara usulan warga dengan barang yang sudah diterima. Apabila ada barang yang bukan merupakan usulan dari warga, warga berhak mengembalikan barang tersebut. Lalu Ketua RT harus memaksimalkan partisipasi warganya untuk ikut hadir dalam forum rembug warga, agar warga di 1 (satu) lingkungan RT tahu apa yang telah direncanakan bersama dan bisa dimanfaatkan bersama.

2. Dampak/Hasil dari Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Tahun 2015

Menurut David C. Korten keberhasilan dalam implementasi program dinilai dari adanya 3 kesesuaian antara lain yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksanaan dan penerima manfaat/kelompok sasaran. Artinya apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Suatu program yang telah direncanakan pasti akan menimbulkan dampak/hasil yang merupakan *output* dari adanya program tersebut. Walaupun mungkin dari dampak/hasil bisa dikatakan maksimal, atau bahkan belum maksimal. Dampak/hasil bisa diketahui dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah program fasilitasi anggaran sebesar Rp 50.000.000/RT/tahun, dimana mencakup 3 (tiga) bidang, yakni bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial. Untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 diikuti oleh 1.436 RT di

Kota Kediri. Dengan banyaknya RT di Kota Kediri, maka dampak/hasil pada tiap masing-masing RT akan berbeda, walaupun secara signifikan tidak berbeda jauh.

Setiap program memiliki target/sasaran tertentu. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 memberikan dampak/hasil positif yakni terpenuhinya pembangunan infrastruktur-infrastruktur berskala kecil di lingkungan RT yang selama ini belum tersentuh. Dan apabila infrastruktur-infrastruktur sudah dirasa memenuhi, maka target/sasaran kedepannya adalah sektor ekonomi dan sektor sosial.

Sehingga dari hasil penelitian di 3 RT (Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) mengenai realisasi dana Prodamas tahun 2015, ketiga RT tersebut sebagian besar direalisasikan pada pembangunan sektor infrastruktur-infrastruktur.

Namun proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya melalui pembangunan di sektor infrastruktur saja, akan tetapi juga perlu diimbangi oleh pembangunan di sektor ekonomi. Dengan adanya keseimbangan antara infrastruktur dan ekonomi, diharapkan agar infrastruktur yang sudah cukup baik, akan lebih mudah dalam meningkatkan perekonomian. Dan dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) khususnya Kantor Pemberdayaan Masyarakat selaku organisasi pelaksana dan Ketua RT yang bersentuhan langsung dengan warganya di masing-masing lingkungan RT, dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan ide-ide atau gagasan perihal perencanaan yang telah mereka susun, sehingga perencanaan tahun ini akan berkelanjutan di tahun berikutnya.

Adapun gambaran/tanggapan dari ketiga Ketua RT (Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) mengenai dampak/hasil dari implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015, karena di lingkungan RT-lah Prodamas ini dijalankan. Berikut hasil wawancara cara peneliti:

1) Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Hasil wawancara dengan Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran yang ada di pusat kota, maka terlihat jelas pada implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 berjalan lancar. Hal ini terjadi karena proses sosialisasi program berjalan dengan baik, dan sebagian warga dilingkungan RT telah menerima atau paham dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Dan juga terdapat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya.

2) Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto

Hasil wawancara dengan Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto yang ada di kota bagian tengah, secara teknis pelaksanaannya cukup baik. Namun sosialisasi Prodamas di masyarakat tahun 2015 masih kurang. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat belum jelas dana Prodamas itu dipakai buat apa saja. Sehingga kurangnya sosialisasi Prodamas di tahun 2015 menjadi kendala di RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto.

3) Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Hasil wawancara dengan Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak yang berada di kota bagian pinggir, maka terlihat hampir sama dengan RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto, bahwa pada implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang menyebabkan kurang pemahannya sasaran dan penggunaan dana dari Prodamas tersebut. Dan juga terjadi ketidak sesuaian usulan yang telah direncanakan.

Jadi bisa dilihat bahwa di tahun 2015 implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) khususnya di 3 RT (RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) hanya berjalan lancar di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran di pusat kota, baik dalam sosialisasi penggunaan dana Prodamas maupun kesesuaian usulan yang telah direncanakan. Namun sebaliknya, di kota bagian tengah dan pinggir implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 belum berjalan maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi masyarakat, yang berdampak masyarakat masih belum tahu sepenuhnya mengenai dana Prodamas dibuat apa saja dan adanya ketidak sesuaian usulan atau menyimpang dari usulan yang telah direncanakan.

3. Tantangan Kedepannya dari Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri

Dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri, bisa dikatakan berhasil dalam merubah sistem *top down planning* menjadi *bottom up planning*. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di tahun 2015 telah mencapai sasaran/target yang ditentukan, yaitu setidaknya pembangunan infrastruktur-infrastruktur berskala kecil dilingkungan RT sudah mulai tersentuh dan terpenuhi, dan juga fasilitas pendukung ataupun alat perlengkapan di lingkungan RT juga telah terealisasi sesuai dengan usulan-usulan warga di masing-masing lingkungan RT yang ada di Kota Kediri.

Namun sasaran dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri bukan hanya perbaikan infrasturktur, akan tetapi juga pada bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sebuah program bukan hanya memiliki kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Maka dari itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Hal ini juga menegaskan bahwa meskipun suatu program konsepnya sudah bagus, masih terdapat juga tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, sekecil apapun tantangan-tantangannya yang ada harus segera direspon, supaya ada keberlanjutan dari program tersebut.

Mencermati hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri, Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) memiliki tantangan-tantangan kedepannya. Adapun tantangan-tantangan tersebut adalah:

1) Memberikan inovasi dan ide-ide kreatif kepada masyarakat

Sebagai organisasi pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri, sangatlah perlu dalam memberikan inovasi dan ide-ide kreatif kepada masyarakat. Artinya, organisasi pelaksana juga memberikan arahan terhadap apa yang telah di usulkan masyarakat, sehingga usulan yang telah terealisasi akan berlanjut di kemudian hari. Sebagai contoh, dengan adanya pos kampling, masyarakat membuat jadwal jaga, mungkin juga ditambahin kentongan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari keberlanjutannya. Tapi kalau mereka bersikap pasif, maka pos kampling yang sudah dibangun, mungkin akan dibiarkan saja. Tidak ada jadwal jaga, tidak dirawat, dan dibiarkan begitu saja. Seperti itulah tantangan organisasi pelaksana memberikan ide-ide kreatif, supaya masyarakat dapat memanfaatkan bangunan yang sudah direncanakan oleh mereka sendiri meski di danai oleh pemerintah.

2) Tantangan di sektor ekonomi

Di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) juga menjadi salah satu tantangan dari Prodamas. Dengan adanya usulan-usulan masyarakat yang mengadakan pelatihan. Misalnya, pelatihan memasak, atau menjahit.

Maka perlu adanya sumberdaya pelaksana yang terlatih, agar dengan adanya pelatihan memasak, menjahit, dan lain sebagainya bisa berkembang menjadi sentra ekonomi.

3) Menciptakan kemandirian masyarakat

Adanya program pemberdayaan masyarakat di suatu daerah sebenarnya hanya untuk memancing respon masyarakat. Sehingga kedepannya masyarakat bisa meningkatkan partisipasinya, baik dalam melaksanakan ataupun mengelola dana yang telah dianggarkan, bukan lagi menciptakan ketergantungan masyarakat akan adanya suatu program. Begitu juga Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri tentunya memiliki tantangan kedepannya yaitu memandirikan masyarakat baik dalam hal melaksanakan maupun mengelola dana secara mandiri dan bertanggungjawab. Sehingga kedepannya derajat partisipasi masyarakat meningkat. Arnstein di dalam teorinya mengungkapkan derajat partisipasi masyarakat tertinggi yaitu *Citizen Control* (kendali warga) yang berarti bahwa partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan/program, bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan/program tertentu. Jadi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri akan tercapai jika terciptanya kemandirian masyarakat dan masyarakat secara penuh mampu menjalankan program tersebut. Khususnya di lingkungan RT mampu

melaksanakan program serta mengelola dana secara mandiri dan bertanggungjawab. Sehingga tugas dari pemerintah di era *New Public Service* hanya sebagai fasilitator dan memberikan pelayanan (*service*) kepada masyarakat, bukan lagi mengendalikan (*steering*) masyarakat.

Adapun harapan/masukan dari 3 Ketua RT (RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak) yang mungkin juga menjadi tantangan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1) RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran

Yaitu mengharapkan kinerja tim eksekusi lapangan bekerja dengan baik. Karena pada saat pembangunan paving hasilnya kurang memuaskan dan pengerjaannya kurang rapi.

2) RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto

Yaitu mengharapkan skala prioritas yang menjadi usulan warga lewat rembug/musyawarah warga, agar didahulukan atau segera direalisasikan.

3) RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak

Yaitu mengharapkan bahwa adanya kesesuaian dengan apa yang sudah menjadi usulan warga. Karena kemarin hasil dari usulan warga ada mendadak merubahnya setelah Ketua RT mengecek di Kelurahan.

Menanggapi komentar dari para Ketua RT diatas bahwa kedepannya pemerintah Kota Kediri harus mengevaluasi komentar/masukan dari para Ketua RT, dengan cara mempersiapkan tim eksekusi lapangan yang bekerja dengan baik

atau hanya memfasilitasi sarana dan prasarana saja kalau di lingkungan RT yang bersangkutan mampu untuk mengerahkan warganya untuk bekerja, merealisasikan terlebih dahulu apa yang menjadi skala prioritas di masing-masing RT dan memberikan jaminan bahwa apa yang telah direncanakan warga lewat hasil rembuk warga dapat direalisasikan sesuai dengan rencana di masing-masing RT, walaupun ada perubahan harus didiskusikan bersama atau paling tidak dengan Ketua RT agar tidak menimbulkan prasangka buruk. Hal-hal tersebutlah yang menjadi tantangan-tantangan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan tentang implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri khususnya di RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 di Kota Kediri secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun diantara 1.436 RT yang ada di Kota Kediri tahun 2015, masih ada beberapa belum melaksanakan rembug warga, atau keputusan diputuskan secara pribadi. Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 juga masih belum berjalan dengan baik, seperti yang terjadi di RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak. Realisasi dana Prodamas di tiap RT masih terfokus pada pembangunan infrastruktur-infrastruktur berskala kecil dan pengadaan alat kelengkapan di masing-masing lingkungan RT. Hal ini seperti sasaran-sasaran Prodamas tahun 2015 yakni pembangunan infrastruktur dilingkungan RT yang belum tersentuh.

2. Dampak/hasil dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tahun 2015 di Kota Kediri adalah terpenuhinya perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang ada di lingkungan RT, yang selama ini belum tersentuh. Sehingga kalau kedepannya infrastruktur-infrastruktur sudah dirasa mencukupi, maka akan bergerak ke sektor ekonomi dan sosial. Namun masih ada beberapa kendala di tahun 2015, yakni kurangnya sosialisasi program di masyarakat, khususnya yang terjadi di RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto (kota bagian tengah) dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak (kota bagian pinggir), sehingga menyebabkan perbedaan persepsi, dalam arti sebagian besar warga belum jelas dananya akan dipakai buat apa saja.
3. Tantangan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) kedepannya ada 3 (tiga) poin yaitu pertama, memberikan inovasi dan ide-ide kreatif kepada masyarakat supaya ada keberlanjutan dari apa yang telah direalisasikan lewat Prodamas. Kedua, tantangan di sektor ekonomi yaitu bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin dengan adanya pelatihan-pelatihan tertentu di lingkungan RT. Dan yang ketiga, menciptakan kemandirian masyarakat, dalam arti masyarakat tidak hanya melaksanakan program dan merencanakan apa yang diprioritaskan di lingkungan RT, tetapi masyarakat sanggup mengelola anggaran secara mandiri dan bertanggungjawab.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai kontribusi pemikiran, antara lain:

1. Untuk pelaksana program lebih baiknya memberikan pemahaman/sosialisasi lebih intensif lagi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar paham tentang esensial Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), karena program tersebut ada atau direncanakan untuk kepentingan mereka.
2. Melatih Ketua RT dan pengurus RT untuk membentuk kelompok khusus yang didalamnya adalah warga RT sendiri, dan dipilih secara demokratis terkait dengan pengelolaan dana, agar kedepannya masing-masing RT tidak hanya merencanakan dan menerima kebutuhan yang diprioritaskan, akan tetapi secara mandiri mampu dan bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut.
3. Menciptakan swadaya masyarakat, dimana masyarakat kedepannya tidak hanya tergantung oleh dana Prodamas tiap tahun, akan tetapi mereka menganggapnya hanya sebagai intensif (tambahan) saja. Agar kedepannya masyarakat tidak hanya mengandalkan akan adanya program yang sama dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Syukur, 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas. Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Akip. Haedar & Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, S.R. 1995. *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP. Vol. 35, No. 4. July 1969, pp. 216-224
- Dahama, O.P. and O.P Bhatnagar. 1980. *Educatian and Communication for Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing CO.
- Djalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie, T, Pariata, Westra dkk. 1989. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Gunawan, Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rhineka Karsa.
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Mardikanto, Totok. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung* : Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari dan Martina, 1994, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Poerbakawatja, Soergarda. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung

- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia.
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I.N. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang, IKIP Malang.

Jurnal dan Skripsi

- Butsi, Citra Berlian., Saleh Soeaidy dan Minto Hadi. 2013. Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak TKI (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya). *JAP: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Vol. I No, 4 hal. 1313-1322.
- Kurniawati, Dwi Pratiwi., Bambang Supriyono dan Imam Hanafi. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *JAP: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Vol. I No. 4 hal 9-14.
- Murbeng, Siaga Basu., Mochamad Saleh Soeaidy dan Riyanto. 2013. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung). *JAP: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Vol. I No. 5 hal 1257-1265.
- Nurjhani, Mimin. 2007. Pendekatan, Desain, dan Prosedur Evaluasi Program (Evaluasi kualitatif dan evaluasi kuantitatif). *Makalah: Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Pangesti, Iin Nimang. 2009. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP) (Studi di Desa Senowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). *Jurnal Online Universitas Negeri Malang*.
- Permatasari, Intan. 2014. Implementasi Program Desa Sejahtera (PDST) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi di Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang). *Skripsi, Universitas Brawijaya*.

- Pramelia, Wanda Kiki. 2013. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Masyarakat (Studi pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan). *Skripsi. Universitas Brawijaya*.
- Prastiyo, Ahmad. 2014. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP) (Studi di Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya*.
- Puspita, Henny. 2014. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi di Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura*.
- Sabila, Ayu Novawana., Suryadi dan Wima Yudho Prasetyo. 2015. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan (Studi Kerjasama Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan Masyarakat Desa Hutan Bate Kabupaten Tuban). *JAP: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Vol. III No. 12 hal. 1975-1980.
- Safira, Fidan., Choirul Saleh dan Agung Suprpto. 2015. Implementasi Program Perpuseru dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan (Studi Kasus pada Corporated Social Responsibility Coca Cola Foundation Indonesia di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo). *JAP: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Vol. III No. 5 hal. 770-774.
- Sari, Mitra Puspita. 2015. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Administrasi Negara*. Vol. III No. 2 hal 549-563.
- Tika, Fauziah Yuni Aran., Imam Hanafi dan Riyanto. 2013. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Batu Kota Batu). *JAP: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Vol. I No. 2 hal. 188-196.

Peraturan Daerah

- Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kantor Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Internet

- Redaksi. 2015 " *Proyek Prodamas Mulai Bermasalah*". 17 Desember 2015. <http://www.adakitaneews.com/proyek-prodamas-mulai-bermasalah/>
- Yustiari, Shinta Happy. " *Administrasi Program dan Proyek*". 14 Januari 2016. <http://shintahappyyustiari.lecture.ub.ac.id/?cat=116675>

BIODATA MAHASISWA**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Muhammad Zacky Abdalla
NIM : 125030118113001
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 10 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Grand Kota Blok-E No.06 Kediri
Nomor Telepon : 081232392001
Riwayat Pendidikan : SDN Janti I
SMPN 1 Papar
SMAN 8 Kediri/IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)
Universitas Brawijaya Malang/FIA-Publik

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mokh. Zainy, SH
Pekerjaan : POLRI
Nama Ibu : Dra. Wiwik Mukartini, MM
Pekerjaan : PNS



LAMPIRAN

Tempat Penelitian Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri



Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat



Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran



Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Mojo



Ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Blabak

LAMPIRAN**FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL :**

PPKD	Kediri, Kepada : Yth. Walikota Kediri c.q. Kepala selaku Di KEDIRI		
Bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan hibah /bantuan sosial berupa barang hasil kegiatan Prodamas Tahun Anggaran berupa :			
NO	JENIS BARANG	JUMLAH	URAIAN PENGGUNAAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.			
		Hormat Kami, Ketua RT RW Kelurahan	
. Tembusan : Yth. Lurah			

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama:.....

Jabatan:KetuaRT.....RW.....Kelurahan.....

Alamat:.....

Berkenaan dengan pemberian hibah atau bantuan sosial hasil kegiatan Prodamas Tahun Anggaran yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri, dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan barang yang telah diterima sesuai NPHD atau usulan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,

Yang Menyatakan
Ketua RT RW..
Kelurahan

.....

FORMAT NPHD :

<p>KOP SKPD</p> <p>NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH</p> <p style="text-align: center;">NOMOR : 180/...../419...../20.....</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">NOMOR :/...../...../20.....</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN HIBAH DAERAH HASIL KEGIATAN PRODAMAS</p> <p style="text-align: center;">TAHUN ANGGARAN</p> <p>Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>I. Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan : Lurah</p> <p>Instansi : Kelurahan</p> <p>Alamat :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;</p> <p>II. Nama :</p> <p>No. KTP :</p> <p>Jabatan : Ketua RTRW.....Kelurahan</p> <p>Alamat :</p> <p>Yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat / RTRW.....Kelurahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">TUJUAN PEMBERIAN HIBAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Pemberian hibah ini bertujuan untuk :</p> <p>a. meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;</p> <p>b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan</p> <p>c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial.</p> <p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">BESARAN DAN PENGGUNAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa</p> <p>(1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan peran serta dan kreativitas masyarakat yang bergerak dalam bidang infrastruktur, perekonomian, dan sosial melalui Prodamas.</p> <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Hak PIHAK KESATU adalah :</p> <p>a. melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan PIHAK KEDUA;</p> <p>b. melakukan monitoring atas penggunaan barang yang dihibahkan.</p>
--

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN HIBAH
Pasal 5

Hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan prodamas diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan barang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan Lurah setempat.
- (2) Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah ; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan (b) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Apabila dalam penggunaan hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara maka menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini antara PIHAK KEDUA dan PIHAK LAIN maka PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 8

Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :